



LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA  
TAHUN ANGGARAN 2002

KK.B  
KK-2B  
324-3  
Was  
0

## ORIENTASI DAN KEGIATAN ORGANISASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK STUDI WACANA DAN OBSERVASI KEGIATAN ORGANISASI PEREMPUAN PADA 5 PARTAI POLITIK DI SURABAYA

Oleh:

WASIATURRAHMA, SE.  
Dra. ISWAHJUNI, AK.



3000181033141

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
DIP Nomor : 003/XXIII/1--/2002 Tanggal 1 Januari 2002  
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 13

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

3000181033141



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      |  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi                  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN  
STUDI KAJIAN WANITA**

1. a. Judul Penelitian	:	ORIENTASI DAN KEGIATAN ORGANISASI PEREMPUAN DARI PARTAI POLITIK (Studi Wacana dan Observarsi Kegiatan Kelompok Perempuan pada 5 Parpol)
b. Macam Penelitian	:	
2. Kepala Poyek Penelitian	:	
a. Nama lengkap dan Gelar	:	Wasiaturrahma, SE
b. Jenis kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Panata Muda /3A 132230685
d. Jabatan Sekarang	:	Asisten Ahli
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	Ekonomi/PSW/Ekonomi Pembangunan
f. Univ/Ins./Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Sosial Politik
3. Jumlah Tim Peneliti	:	2 Orang
4. Lokasi Penelitian	:	Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain	:	
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka waktu penelitian	:	6 bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	6.000.000

Mengetahui :

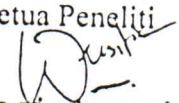
Kepala Puslit. Studi Wanita :

  
Dra. Emy Susanti, MA

NIP 131406097

Surabaya, September 2002


Ketua Peneliti

  
Wasiaturrahma, SE

NIP 132230685

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian Unair,

  
Prof. Dr. M. Sarmanto, M.S.

NIP 130 701 125





## RINGKASAN PENELITIAN

Judul	: Orientasi dan Kegiatan Organisasi Perempuan Partai Politik (Studi Wacana dan Observasi kegiatan Organisasi Perempuan pada 5 Partai Politik di Surabaya)
Ketua Peneliti	: Wasiaturrahma, SE
Anggota	: Dra. Iswahjuni, AK Erma susanti, SE
Fakultas	: Ekonomi
Sumber Biaya	: Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia DIP Nomor: 003/XXIII/1/-/2002 Tanggal 1 Januari 2002 Kontrak Nomor: 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002 Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peluang artikulasi kepentingan politik perempuan melalui studi orientasi dan kegiatan organisasi perempuan di 5 partai politik di Surabaya. Oleh karena itu, studi ini menggali pemahaman pengurus organisasi perempuan, kebijakan partai, dan melakukan observasi kegiatan organisasi perempuan partai. Untuk menggali pemahaman dan pengetahuan pengurus organisasi menggunakan metode *kelompok diskusi terfokus*, sedangkan untuk mengetahui kebijakan partai menggunakan "*critical analysis*", serta *observasi* untuk mengetahui kegiatan partai dan kegiatan organisasi perempuan partai dilakukan dengan

Beberapa petemuan pokok penelitian ini adalah : *Pertama*, tidak semua pengurus organisasi perempuan memahami "gender perspektif", akibatnya program yang direncanakan oleh organisasi perempuan hanya menjawab kebutuhan praktis perempuan. Dengan demikian, kebutuhan strategis yaitu perubahan posisi dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sebenarnya menjadi akar persoalan ketidakadilan gender tidak terpenuhi. *Kedua*, interpretasi pengurus pusat partai politik terhadap kebijakan sangat bias laki-laki, sehingga meskipun di tiap-tiap partai dibentuk organisasi/departemen wanita, tetapi tidak menjamin mengakomodasi kepentingan perempuan. Bahkan dari studi ini dapat disimpulkan banyak kebijakan pusat yang justru melanggengkan "*ketidakadilan gender*". *Ketiga*, kases organisasi perempuan dalam kebijakan partai sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari posisi organisasi perempuan dalam partai. Dari hasil studi ini hanya dua partai yang mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan kebijakan "*gender perspective*" yaitu melalui "*mekanisme pusat*", meskipun secara kultur masih mengalami kesulitan. *Keempat*, hasil observasi kegiatan organisasi perempuan, hanya dua partai yang mempunyai fokus pada peningkatan posisi perempuan dalam partai, dan peningkatan kesadaran politik bagi kader perempuan. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa organisasi perempuan partai belum efektif sebagai sarana artikulasi kepentingan perempuan, mengingat masih sedikitnya "kesadaran gender" pada pengurus organisasi perempuan dan hambatan dari partai sendiri.

Berbagai program perlu direncanakan untuk meningkatkan peran organisasi perempuan sebagai media suara kepentingan perempuan yaitu melalui pendidikan "gender sensitivity" untuk meningkatkan kesadaran gender, pengembangan strategi untuk membawa suara perempuan dalam partai politik, dan menggalang kekuatan dari luar partai.



## SUMMARY OF RESEARCH

Title : The Orientation and Activity Of Women Organisation of Parties (Discourse Study and Observation on Activity of Women Organization of 5 Parties in Surabaya)

The head of researchers: Wasiaturrahma, SE

Members : Dra. Iswahjuni, AK  
Erma susanti, SE

Faculty : Economic

Source Of Funds : Projec For Increase Human Resources  
DIP Number: 003/XXIII/1/--/2002, Date January 1, 2002  
Contrac Number: 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas.

---

At the general, the research purpose to know how the opportunity of women interest to be articulation by the orientation study and activity of women organization of 5 parties in Surabaya. For this purpose, the study investigate the understanding of the comitee of the women organization, the platform of the party, and do observe activity of women organization.

The research found that; (First), There aren't all the comitee of the women organization understand and aware with "*gender prespective*", and the result, the activities planning are not anwer "*the women question*". The program only to answer the pratical women need solution. So, the action can't change the base of the "Women Problem", that's the gender equity. (Second), For the party platform interpretation of the Nasional Comitee , although the parties were founded the women organization , there aren't warranty that women interest to be accommodation. Because the understanding of the Nasional Comitee are "*male bias*", so imply the policy. (Third), The access of the women can to be predicted by the position of the women organization in the parties. From this study, only two parties have mechanism to integrate the "*gender prespective*" to the party's policies. (Fourth) For the activity planning, only two parties had focused on to strengther women position at the party, and do training for raise the "gender awareness".

In general, it can summary, that the women organizations are not effective yet for articulate the women need, because the "*gender prespective*" are not internalize yet in the activist, specially for the comitee. In other side there are many culture barrier for the women to get position at the party. So there are some program can increase the effectively of the women organization , there are (1) "*gender sensitivity training*" for the activists, (2) to develop the advocacy strategy to articulate the women issu, (3), build the network with the NGO and others organization to push "the women issu: together in every lines.



## KATA PENGANTAR

Penelitian ini adalah salah satu bentuk partisipasi peneliti untuk ikut dalam mengembangkan kajian-kajian mengenai perempuan dan politik di lingkungan Pusat Studi wanita, Universitas Airlangga. Dalam penelitian kali ini mengkaji organisasi perempuan partai politik dalam kerangka artikulasi kepentingan perempuan di lima partai politik terbesar setingkat kotamadya Surabaya.

Bisa diselesaikannya penelitian ini pada dasarnya berkat keterlibatan dan sumbangan dari berbagai pihak. Beberapa pihak yang pantas disebut disini antara lain Pertama, adalah Lembaga Penelitian Universitas Airlangga sebagai pihak yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan dana bagi terselenggarakannya penelitian ini. Kedua, lembaga Pusat Studi Wanita beserta jajaran kepengurusannya, yang telah memberikan masukan yang berarti pada penelitian ini. Ketiga, kepada mbak Eva, yang memberikan perspektif dan ikut merivisi studi ini, teman-teman di Kaukus Perempuan Politik, para aktivis perempuan di partai, SA-KPPD, serta Kunto yang telah membantu peneliti dalam proses penggalian data.

Harapan tim peneliti, semoga laporan ini bisa memperkaya dan memberikan manfaat bagi kelanjutan studi-studi mengenai masalah perempuan dalam politik.

Surabaya, Oktober 2002

Tim Peneliti





## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	6
I.3. Tinjauan Pustaka.....	6
I.3.1. Analisa Gender Sebagai Perspektif Sosial.....	6
I.3.2. Teori Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender.....	14
I.3.2.1. Pendekatan Pembangunan.....	16
I.3.3. Teori-teori Politik Internasional Berperspektif Feminis.....	21
I.3.3. Konstruksi Politik Perempuan dalam masa Orde Baru.....	23
I.4. Tujuan penelitian.....	25
I.5. Kontribusi Penelitian.....	25
I.6. Metode dan Prosedur Penelitian.....	25
I.7. Lokasi Penelitian.....	26
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM</b>	
II.1. Keberadaan Organisasi Perempuan.....	28
II.2. Latar Belakang Terbentuknya Organisasi Perempuan.....	28
II.3. Visi dan Misi Organisasi Perempuan.....	29
II.3.1. Tujuan Pembentukan Organisasi Perempuan .....	30
II.4. Pemahaman Tentang Pentingnya Organisasi Perempuan.....	32
II.5. Evaluasi Terhadap Organisasi Perempuan.....	33



<b>BAB III : TEMUAN DAN ANALISIS DATA</b>	
III.1. Pemahaman Aktivis Perempuan Partai Terhadap Gender	
Perspektif.....	34
III.1.1. Pemahaman dan Kesadaran Analisa Gender.....	34
III.1.2. Strategi Pemberdayaan Perempuan.....	41
III.2. Interpretasi Kebijakan Partai Terhadap Isu Perempuan.....	43
III.2.1. Peluang Aspirasi Perempuan Dalam Partai Politik.....	43
III.2.2. Kebijakan Partai Terhadap Kuota.....	46
III.2.3. Kebijakan Partai Tentang Ketidakadilan Terhadap Perempuan.....	47
III.2.3.1. Kebijakan Partai Tentang Diskriminasi Kerja.....	47
III.2.3.2. Kebijakan Partai Terhadap Isu Pekerja Seks.....	49
III.2.3.3. Perlindungan Terhadap TKW dan PRT.....	51
III.2.3.4. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....	53
III.2.4. Kebijakan Partai Mengenai Hukum Yang Berperspektif Perempuan .....	54
III.3. Akses Organisasi Perempuan Terhadap Kebijakan Partai.....	56
III.3.1. Posisi Organisasi Perempuan Dalam Partai.....	56
III.3.2. Peluang Perempuan Dalam Kepengurusan Partai.....	58
III.3.3. Kebijakan Kuota Perempuan di Parlemen.....	59
III.3.4. Strategi Pemberdayaan Perempuan Internal Partai.....	60
III.4. Kegiatan Organisasi Perempuan.....	62
<b>BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
IV.1. Simpulan.....	65
IV.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keberadaan Organisasi Perempuan di Partai politik.....	28
2. Latar Belakang Pembentukan Organisasi/Lembaga perempuan..	29
3. Visi dan Misi Organisasi Perempuan.....	30
4. Tujuan Organisasi/Lembaga Perempuan.....	31
5. Tingkat Kepentingan Organisasi Perempuan.....	32
6. Evaluasi Terhadap Organisasi Perempuan.....	33
7. Cara Pandang Melihat Persoalan Perempuan.....	38
8. Pemecahan Masalah Perempuan.....	39
9. Strategi Pemberdayaan.....	42
10. Strategi dan Agenda Pemberdayaan Perempuan.....	45
11. Kebijakan Kuota.....	46
12. Kebijakan Terhadap Diskriminasi Kerja.....	48
13. Kebijakan Terhadap Fenomena Pekerja Seks.....	50
14. Kebijakan Terhadap Fenomena TKW dan PRT.....	52
15. Kebijakan Partai Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan.....	53
16. Kebijakan Terhadap Hukum Yang Mengakomodasi Perempuan.....	55
17. Posisi Organisasi Perempuan dalam Partai.....	58
18. Peluang Perempuan dalam Kepengurusan Partai.....	59
19. Kebijakan Kuota.....	60
20. Strategi Pemberdayaan Internal.....	61
21. Kegiatan Organisasi Perempuan.....	63





## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.. Kerangka Kerja Penelitian.....	27



## BAB I PENDAHULUAN

*"Walaupun memang benar tidak ada kaitan langsung antara tingkat partisipasi perempuan di lembaga-lembaga politik dengan kontribusi mereka terhadap kemajuan kaum perempuan, namun tingkat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga-lembaga politik dapat dipandang sebagai sesuatu yang amat penting untuk menjamin agar kaum perempuan memiliki pengaruh yang bermakna dalam proses politik"*

*Progress Report PBB pada Konferensi Wanita SeDunia, Beijing, tahun 1995.*

### I.1. Latar Belakang Masalah

Potongan kalimat diatas adalah hasil progress report PBB pada Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1995 mengenai gender dan pembangunan, merupakan gambaran dari pandangan negara-negara dalam melihat pentingnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Meskipun belum ada suatu studi yang komprehensif, yang bisa melihat keterkaitan antara tingginya jumlah perempuan di parlemen atau jajaran kepengurusan partai politik dengan meningkatnya kondisi perempuan, beberapa alasan perlunya keseimbangan gender dalam setiap proses politik—keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan pada semua tingkat serta mekanisme pada semua level dalam upaya memajukan perempuan—sudah merupakan isu yang banyak diterima di kalangan partai dan organisasi masyarakat. Chusnul Mar'iyah (1998) melihat bahwa sistem kuota telah menjadi sebuah mekanisme yang penting untuk meraih peningkatan keterwakilan perempuan di dalam proses-proses politik, serta sebagai sebuah sarana untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan politik perempuan tetap disuarakan dan diwakili. Pemberlakuan kuota atau strategi-strategi langkah afirmatif merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan sebuah sistem politik yang demokratis dan dibangun di atas azas utam kesetaraan gender. Tuntutan pemberlakuan kuota adalah bagian dari hak-hak perempuan di dunia politik. Hal ini karena disamping perempuan adalah jumlahnya mayoritas, hak-hak perempuan sebagai warga negara belum mendapat perhatian yang selayaknya, bahkan terus-menerus dipinggirkan dalam proses-proses pembuatan keputusan.



Wacana kuota keterwakilan perempuan menjadi wacana lintas negara khususnya di negara – negara dunia ketiga. Di Indonesia, isu kuota menjadi semakin marak dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2004. Banyak argumentasi yang dikembangkan di masyarakat tentang pentingnya kuota keterwakilan politik bagi perempuan yang diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, dari data sensus penduduk yang dilakukan oleh BPPS pada tahun 2000, jumlah perempuan Indonesia lebih besar daripada jumlah laki-laki. Prosentase jumlah penduduk perempuan adalah 52%, sedangkan laki-laki adalah 48%. Dengan demikian menurut sudah menjadi kewajaran, jumlah keterwakilan perempuan setara dengan jumlah keterwakilan laki-laki. Teori demokrasi keadilan inilah yang menjadi acuan para aktivis perempuan baik di luar maupun di dalam partai politik menuntut kuota di parlemen. *Kedua*, Dominasi laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan membuat produk-produk kebijakannya “*gender blind*” dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan yang seringkali berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian perempuan mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang mereka paling tahu dan paling bisa menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Dengan komposisi yang ada dalam proses pengambilan keputusan politik yang sangat didominasi oleh laki-laki, perempuan tidak bisa mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. *Ketiga*, Adanya indikasi, jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang paling jelas adalah akan terjadinya perluasan isu politik ke arah masalah-masalah yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi wanita, dan sebagainya. Kehidupan politik mungkin akan lebih bermoral, karena perempuan lebih mementingkan isu-isu “*conventional politic*” seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada “*hard politic*” seperti “*arms race*”, perang, senjata, nuklir dan sebagainya. *Keempat*, Kuota adalah satu-satunya cara yang memungkinkan mengejar ketertinggalan perempuan dan underrepresentation. Kuota tidak diskriminatif tetapi adalah kompesasi untuk kesulitan dan diskriminasi di bidang politik yang selama ini dialami perempuan. Alasan lainnya adalah bahwa “*women's experience*” harus diikutsertakan dalam

politik dan representasi adalah salah satu asas demokrasi yang membuat alasan itu legitimate.

Selain itu secara International telah diakui dan disetujui, bahwa hak politik perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Konferensi Inter Parliamentary Union (IPU) pada tahun 1997 di New Dehli, mendeklarasikan pernyataan bahwa : Hak Politik Perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Mengacu pada kesepakatan internasional tersebut dapat terlihat bahwa kepentingan perempuan yang hakiki, yaitu hak perempuan merupakan kepentingan yang harus menjadi perhatian masyarakat, karena merupakan penghargaan terhadap martabat perempuan.

Pengalaman Afrika Selatan melihat peranan penting perempuan di parlemen dalam mempengaruhi kerja dan kebijakan departemen-departemen, khususnya pada proyek-proyek yang mempengaruhi mereka. Keberhasilan tersebut antara lain *Pertama*, departemen kesehatan telah berusaha menciptakan sistem perawatan kesehatan primer yang bisa dengan mudah didapatkan perempuan dan anak-anak. *Kedua*, Departemen Kesejahteraan telah memprakarsai proyek percontohan khusus untuk orang yang menanggung resiko terutama ibu tunggal. *Ketiga*, departemen pengairan dan kehutanan yang telah memprakarsai program kehutanan masyarakat yang menguntungkan masyarakat pedesaan baik secara lingkungan maupun finansial (Myankayakaya, N & Manzini, 2002)

Dalam konteks Indonesia, Chusnul Mari'ah (1998) melihat meningkatnya jumlah perempuan dalam kekuasaan formal tidak secara otomatis merubah posisi dan kondisi perempuan. Hal ini karena beberapa kondisi di Indonesia, antara lain *Pertama*, munculnya para perempuan yang menjadi pemimpin atau mempunyai kekuasaan formal adalah karena hubungan "male power". Beberapa tokoh perempuan yang mempunyai otoritas kekuasaan antara lain Megawati dan Tutut muncul karena kebesaran ayahnya. Kemudahan dan nama besar ayah, tentunya akan mempengaruhi kualitas kepemimpinan para tokoh tersebut dibanding tokoh yang muncul karena kualitas dan tempaan dari bawah. *Kedua*, situasi dan budaya

politik di Indonesia yang sangat patriarkal, dengan dominasi militer—yang bisa dikatakan sebagai simbol dari sistem masyarakat yang didominasi oleh laki-laki—menjadi kendala bagi tumbuhnya kepemimpinan perempuan.

Dalam era reformasi ini, diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar terhadap kondisi perempuan. Namun setelah berjalan 2 tahun ini, belum nampak tanda-tanda perbaikan kondisi perempuan. Menurut Mariah, Reformasi politik disini haruslah menyangkut perubahan yang menyangkut dasar kehidupan politik, yang terdiri budaya politik, struktur kekuasaan, proses politik menuju ke arah system yang demokratis. Konsep-konsep seperti kekuasaan, keadilan, demokrasi seringkali dianggap konsep yang netral, padahal didalamnya terkandung nilai-nilai gender yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian perubahan harus dilihat dari sistem politik, institusi politik, proses politik dan kebijakan-kebijakan politik sebagai hasil dari proses politik tersebut. Hal ini menyangkut berbagai aspek kehidupan politik untuk mengarah pada proses yang lebih demokratis. Didalam perspektif gender tentunya perlu keterlibatan perempuan di dalam proses politik tersebut. Dalam hal ini perlu pemahaman demokratis dengan melihat sejauh mana kelompok marginal terlibat di dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partai politik adalah organisasi kekuasaan yang merupakan kekuatan politik. Fungsinya adalah membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan anggota dan simpatisannya melalui proses demokratis yang mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Secara universal dan demokratis peran utama partai politik adalah memegang kekuasaan negara bila berhasil memperoleh mayoritas suara dalam pemilu. Fungsi lainnya adalah menyiapkan pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat, sarana partisipasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Partai sebagai organisasi yang memberikan pendidikan politik pada rakyat, dan merupakan arena partisipasi bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pengembangan program aksi dan strategi, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari pengikutnya.



Sistem pemerintahan yang demokratis seharusnya juga bermanfaat bagi dan memperhitungkan kepentingan perempuan. Peran partai politik disitu sangat besar, karena partai partai dapat berusaha meningkatkan akses pada posisi kepemimpinan, memberikan pendidikan politik bagi perempuan dan memasukkan kepentingan perempuan dalam program politiknya.

Turunnya partisipasi perempuan di dunia politik formal, yaitu dari 11% pada masa Orde Baru turun menjadi 6% pada pemilu 1999, tentunya akan mengancam upaya pemberdayaan perempuan. Porsi yang demikian kecil tentunya akan menyulitkan perempuan untuk menjadi kelompok yang cukup bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Dalam kondisi dimana akses perempuan amat kecil terhadap pengambilan keputusan, maka kecil pula kemungkinan untuk menciptakan perubahan positif bagi perbaikan status perempuan.

Sementara itu , untuk menciptakan sebuah perubahan yang sifatnya struktural maka tiada pilihan lain kecuali terlibat aktif dalam di dunia politik. Demikian pula bagi keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan. Ketika pilihan sudah ditetapkan untuk memperjuangkan aspirasi perempuan di arena poliik formal, maka saluran yang paling strategis adalah melalui partai politik karena merupakan mekanisme politik formal dalam pengambilan keputusan.

Pengalaman pahit pengalaman pahit dari pemilu 1999 yang lalu mengharuskan kita untuk bersikap membuta untuk memgharapkan dukungan partai politik bagi perbaikan status perempuan. Sikap realistis menjadi keharusan bagi kelompok perempuan agar dapat menentukan strategi perjuangan di dunia plitih. Dalam konteks politik di indonesia, pemilu dapat terjadi sewaktu-waktu namun jika kelompok perempuan sudah menentukan pilihan posisi di dunia pilitik, itu bukan merupakan isu besar.

Untuk menentukan posisi politik gerakan perempuan di dunia politik di masa mendatang, kita perlu tahu dinamika wacana dan kegiatan partai politik yang



berkaitan dengan isu perempuan. Dalam hal ini keberadaan organisasi perempuan di dalam partai politik dapat di anggap sebagai representasi partai yang mencerminkan dinamika wacana dan posisi partai terhadap isu perempuan. Sebuah studi mendalam tentang segmen perempuan dari partai politik dapat membantu kelompok perempuan dalam menentukan posisinya dalam perjuangan di dunia politik.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wacana pengurus inti organisasi perempuan partai politik tentang isu pemberdayaan perempuan?
2. Bagaimana akses organisasi perempuan terhadap kebijakan partai secara keseluruhan?
3. Apa saja kegiatan organisasi?

## **1.3. Tinjauan Pustaka**

### **1.3.1. Analisa Gender sebagai Perspektif Sosial**

Akhir-akhir ini berbagai tulisan di koran dan buku, atau di berbagai kegiatan seminar dan diskusi banyak membicarakan tentang protes dan gugatan berkaitan dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan di hampir semua sektor dan tingkatan, mulai dari tingkat internasional , negara , keagamaan, dan kebudayaan, ekonomi, kemasyarakatan , sampai kerumahtanggaan. Gugatan terhadap penghentian atas segala bentuk diskriminasi ini dikenal dengan istilah feminisme. Feminisme, menurut Vanessa Baird (1992, dalam Zein, 1999), adalah "*about trying to live your life as you would wish rather than as men or male society would wish equals right*". Seperti paradigma sosial lainnya, proses perdebatan "*discourse*" feminisme sangat kompleks hingga muncul berbagai macam aliran feminisme antara lain feminisme sosialis, feminisme liberalis, dan feminisme radikal, namun dasar dari analisa dalam melihat persoalan dan relasi peran perempuan dan laki-laki adalah analisa gender.



Istilah gender pertama dikembangkan sebagai suatu analisa ilmu sosial oleh Ann Oakley (1972, dalam Fakih, 1996). Sejak saat itu menurut Fakih (1996), gender dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum.

Gender sejak dua dasa warsa terakhir telah menjadi bahasan yang memasuki setiap analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial.

Gender berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki mempunyai penis, memiliki jakun, memproduksi sperma dan ciri-ciri biologis lainnya yang berbeda dengan biologis perempuan. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui dan alat-alat biologis perempuan lainnya. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada perempuan selamanya, fungsinya tidak bisa ditukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat).

Sementara itu konsep gender menurut Oakley (1972, dalam Fakih, 1996), adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan lain sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidaklah kodrat, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, dan sebagainya, sementara itu ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. Gender berubah menurut waktu dan tempat. Misalnya saja zaman dulu ada suku tertentu yang perempuan lebih kuat dari laki-laki, tapi pada zaman lain dan tempat berbeda, lelaki yang lebih kuat.

Eangels( dalam Fakih, 1996), melihat sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural dan keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang panjang gender lambat laun

menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat yang tidak bisa diubah lagi. Sebaliknya sosialisasi konstruksi sosial tentang gender ini secara evolusi akhirnya mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya sifat gender laki-laki harus kuat dan agresif, sehingga konstruksi sosial itu membuat laki-laki terlatih dan termotivasi mempertahankan sifat itu, maka laki-laki lebih kuat dan lebih besar.

Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini kerana kaitan erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Sebagai analisis baru, sesungguhnya analisis gender tidaklah kalah mendasar. Justru analisa gender ikut mempertajam analisa kritis yang sudah ada. Misalnya analisa kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap system kapitalisme akan lebih jika pertanyaan gender juga dikemukakan. Demikian halnya analisa kritis dalam bidang kebudayaan maupun politik, tanpa pertanyaan gender, akan berwatak mendua, disatu saat sedang memperjuangkan suatu bentuk ketidakadilan, namun pada saat yang sama justru melanggengkan suatu bentuk ketidakadilan gender. Dengan demikian analisis gender merupakan analisa kritis yang mempertajam berbagai analisis kritis ekonomi, social, politik, dan budaya yang sudah ada.

Yang menjadi akar persoalan perempuan adalah karena, pertama, konstruksi social (gender) dianggap sebagai kodrat. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan social tersebut. Perbedaan yang ditentukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan biologis itu dianggap ketentuan Tuhan. Masyarakat sebagai suatu kelompoklah, yang menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai suatu keharusan, untuk membedakan lelaki dan perempuan. Keyakinan itu selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, penuh dengan proses negosiasi, restensi maupun dominasi. Lama-kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap sebagai alamiah, normal dan kodrat, sehingga bagi yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan



melanggar kodrat. Oleh karena itu antara bangsa-bangsa dalam kurun waktu yang berbeda, pembagian gender tersebut berbeda-beda. *Kedua*, perbedaan gender tersebut ternyata mengantarkan pada ketidakadilan gender (gender inequalities). Ketidakadilan yang dilahirkan oleh ketidakadilan gender inilah yang sebenarnya sedang digugat. Ternyata dalam sejarah perkembangan hubungan yang tidak adil, menindas dan mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut, bentuk manifestasi ketidakadilan gender ini adalah dalam mempersepsi, memberi nilai serta dalam pembagian tugas antara lelaki dan perempuan, uraian berikut menganalisis bagaimana manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pekerjaan mereka terjadi. (Fakih, 1996)

Sesungguhnya perbedaan gender (gender differences) tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun persoalannya ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum lelaki dan perempuan menjadi korban sistem itu. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender tersebut dapat dipahami melalui berbagai manifestasinya ketidakadilan tersebut antara lain sebagai berikut (Fakih, 1996):

### 1. Marginalisasi Perempuan

Salah satu bentuk pemiskinan yang berakibat hanya pada jenis kelamin tertentu (perempuan) yang disebabkan karena keyakinan gender. Ada berbagai macam dan bentuk, serta mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat dari ideologi gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa dipilih menjadi sumber dari kebijaksanaan pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagamaan, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Banyak studi telah dilakukan membahas bagaimana program pembangunan telah memiskinkan kaum perempuan. Misalnya saja program revolusi hijau (Green Revolution) telah menyingkirkan secara ekonomis (memiskinkan) kaum perempuan dari pekerjaan mereka. Di Jawa misalnya, program ini dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak mungkin lagi menggunakan ani-ani,



alat yang biasa digunakan kaum perempuan. Akibatnya banyak perempuan miskin di desa menjadi termarginalisasi yakni tersingkir dari sawah. Ini berarti bahwa program revolusi hijau tersebut dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender. Marginalisasi terjadi juga karena adanya diskriminasi terhadap pembagian pekerjaan menurut gender. Ada jenis pekerjaan yang dianggap cocok bagi perempuan karena keyakinan gender tertentu. Misalnya karena perempuan dianggap tekun, sabar, pendidik dan ramah, maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah sekretaris, guru TK, ataupun penerima tamu. Persoalannya timbul ketika jenis pekerjaan yang dikuasai oleh perempuan tersebut selalu dinilai lebih rendah. Siapa berani menjamin bahwa "pembantu rumah tangga" yang mayoritas dikuasai oleh perempuan, lebih ringan dibanding "sopir rumah tangga". Namun gaji sopir lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga.

## **2. Subordinasi Pekerjaan Perempuan**

Pandangan gender menyebabkan subordinasi pada perempuan. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda menurut tempat dan waktu. Dulu ada anggapan di Jawa bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh, akhirnya ia akan ke dapur. Bahkan pemerintah dulu pernah memiliki peraturan jika suami akan pergi belajar bisa memutuskan sendiri. Sementara istri yang hendak tugas keluar negeri harus seijin suami. Dirumahtanggapun masih sering kita dengar jika keuangan keluarga terbatas, maka yang berhak sekolah adalah menyekolahkan adalah anak laki-laki. Praktek demikian sesungguhnya berkat dari suatu kesadaran gender yang tidak adil. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah semua pekerjaan yang dikategori sebagai reproduksi dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai kaum lelaki. Hal ini menyebabkan banyak lelaki dan perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan ini ternyata tidak hanya terjadi di rumah tangga, juga terproyeksi ditingkat masyarakat dan tempat pekerjaan (pabrik). Keyakinan gender ternyata



ikut menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuan dalam struktur perusahaan dan pabrik-pabrik.

### 3. Stereotipi Atas Pekerjaan Perempuan

Stereotipe adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, yang bersumber pada stereotip. Misalnya saja label bahwa perempuan itu bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Bahkan jika ada pemerkosaan terhadap perempuan, ada kecenderungan masyarakat justru menyalahkan korbannya. Masyarakat dahulu banyak beranggapan bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat bahwa pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotip ini. Dalam kaitan dengan pekerjaan perempuan, karena anggapan lelaki adalah "pencari nafkah" keluarga, maka perempuan yang bekerja selalu dianggap "sambilan" atau "membantu suami". Demikian juga banyak jenis pekerjaan perempuan yang dianggap "tidak bermoral" misalnya pekerjaan sebagai "pelayan" tempat minum atau "tukang pijat". Atau pekerjaan yang ada kaitannya dengan "industri" perhotelan dan "tourisme", serta pekerjaan yang dilakukan pada waktu malam hari, dianggap tidak bermoral.

### 2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini sumbernya macam-macam, namun ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai "*gender-related violence*" yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan ditingkat rumah tangga sampai ditingkat negara, bahkan dari tafsir



agama. Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan kekerasan gender ini, sebagai berikut:

- a. Dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk didalamnya perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan dan lain sebagainya.
- b. Dalam bentuk pemukulan dan serangan non fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Masuk dalam kekerasan rumah tangga ini adalah kekerasan atau penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
- c. Dalam bentuk penyiksaan organ alat kelamin (*genital mutilation*) seperti misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan dilakukan oleh sesuatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuatnya adalah karena adanya anggapan dan bias gender di masyarakat yakni untuk mengontrol kaum perempuan.
- d. Dalam bentuk pelacuran (*prostitution*) dan perdagangan perempuan. Pelacuran adalah suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standard ganda terhadap pekerja sex ini. Yang pertama mereka melarang dan menangkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara itu, perlindungan perempuan dari segala bentuk perdagangan manusia juga sangat minim, baik itu dalam bentuk pelacuran maupun buruh migran.
- e. Pelecehan seksual. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang. Jenis kekerasan semacam ini banyak terjadi di lingkungan kerja atau pabrik; ada beberapa bentuk yang dapat dikategorikan pelecehan seksual, antara lain kekerasan terselubung (*molestation*) yakni memegang atau menyentuh bagian dari tubuh perempuan dalam berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaannya.





Pelecehan seksual ini juga sering terjadi di tempat umum, seperti bus kota dan lain sebagainya. Selain itu pelecehan juga terjadi dalam bentuk penyampaian lelucon jorok secara vulgar dan ofensif di hadapan kaum perempuan, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor, menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya dalam struktur organisasi kerja, meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau promosi di tempat kerja, atau menyentuh/menyenggol bagian tubuh tanpa seijin yang bersangkutan.

- f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*). Keluarga berencana dibanyak tempat juga menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan sering kali yang dijadikan korban terhadap program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum lelaki juga. Namun lantaran bias gender, perempuan dipaksa untuk sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik maupun jiwa mereka.

### **5. Gender dan Beban Kerja Lebih Berat**

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Sehingga perempuan menerima beban kerja untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga; mulai dari mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air mandi dan memelihara anak. Dikalangan keluarga miskin, beban ganda terjadi, selain harus bekerja domestik, mereka masih harus bekerja membantu mencari nafkah. Bagi golongan kelas kaya, beban kerja ini kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja berat, tanpa perlindungan dan kebijakan negara. Selain tanpa perlindungan, hubungan mereka bersifat feodalistik dan perbudakan, serta masalahnya belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas. Bagi buruh perempuan, dalam



sistem masyarakat yang bias gender mereka menderita apa yang dikenal dengan beban ganda. Di rumah mereka mengerjakan sebagian besar pekerjaan domestik, sementara di pabrik atau di tempat kerja juga mengerjakan berbagai pekerjaan yang sangat membebani. Bagi buruh perempuan yang bekerja, sesungguhnya sering menghadapi eksploitasi ganda, baik di pabrik maupun di rumah. Namun bagi perempuan istri buruh yang tidak bekerja, beban kerja juga mereka tanggung. Dalam sistem kapitalisme, terjadi apa yang dikenal "*eksploitasi pulang ke rumah*". Buruh yang dieksploitasi di pabrik, selanjutnya pulang ke rumah dan di rumah ganti mengeksploitasi istri mereka. Dengan demikian buruh terlayani kesejahteraan baik fisik maupun psikologis mereka. Oleh karena itu, sistem kapitalisme sangat diuntungkan oleh adanya ketidakadilan gender.

### **I.3.2. Teori Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender**

Moser melihat bahwa dalam perencanaan pemberdayaan perempuan perlu untuk mencukupi kebutuhan praktis dan strategis. Dalam kebanyakan rumah tangga yang berpenghasilan rendah, pekerjaan perempuan tidak hanya terdiri dari kegiatan reproduktif (melahirkan dan, merawat, memelihara rumah, melayani suami, dsb) untuk menjamin pengelolaan dan reproduksi angkatan kerja, tetapi juga kegiatan produktif, yang sering menjadi sumber penghasilan kedua. Kerja perempuan di pedesaan biasanya dalam bentuk kerja pertanian, Sementara di daerah perkotaan perempuan sering bekerja dalam sector informal yang berlokasi di dalam rumah (untuk pekerjaan subkontrak atau kerja-kerja borongan) atau di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu perempuan juga terlibat dalam pengelolaan kegiatan komunitas (*community managing*) atau yang berlangsung di daerah pemukiman setempat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan membawa implikasi yang berbeda bagi pembuat kebijaksanaan. Karena peran rangkap tiga tidak diakui, kenyataan bahwa perempuan tidak sekaligus dan seimbang mengemban kewajibannya dalam peran-peran reproduktif, produktif dan aktivitas komunitas, atau kemasyarakatan, diabaikan. Tambahan lagi karena sifatnya yang mempunyai nilai tukar, hanya kerja produktif perempuan yang diakui sebagai kerja. Kerja-



kerja reproduktif dan aktivitas kemasyarakatan tidak bernilai karena dipandang "alamiah" dan tidak produktif. Hal ini mempunyai konsekuensi yang serius terhadap perempuan. Ini berarti mayoritas, jika tidak semua pekerjaan yang mereka lakukan tidak tampak dan gagal untuk diakui sebagai suatu pekerjaan oleh kaum laki-laki dalam komunitas tersebut, maupun oleh para perencana yang bertugas untuk menilai perbedaan-perbedaan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya mayoritas pekerjaan laki-laki dihargai, baik secara langsung melalui pemberian upah maupun secara tidak langsung melalui status dan kekuasaan politik. Meskipun terdapat kecenderungan untuk memandang kebutuhan laki-laki dan perempuan secara serupa, realitas hidup mereka menunjukkan keadaan yang sangat berbeda.

Mosser melihat, bahwa karena masyarakat tidak melihat realitas peran rangkap yang dialami perempuan, dan dari kenyataan bahwa kebutuhan perempuan tidak selalu sama dengan kebutuhan laki-laki, maka mereka tidak menyadari perlunya keterkaitan perencanaan kebijaksanaan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan.

Perencanaan bagi perempuan berpenghasilan rendah di Dunia Ketiga mesti didasari atas kepentingan mereka atau dengan perkataan lain, masalah yang diutamakan mereka. Dalam identifikasi kepentingan ini, perlu membedakan kepentingan perempuan yaitu antara kepentingan praktis gender dan kepentingan strategis gender, mengikuti konseptualisasi yang dibuat oleh Maxine Olyneux (1985).

Kebutuhan strategi gender adalah kebutuhan yang dirumuskan dari analisa sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, dan dari analisa ini diidentifikasi kepentingan strategis gender untuk mencapai suatu kelembagaan masyarakat yang lebih setara dan lebih memuaskan daripada yang ada sekarang, baik dilihat dari struktur maupun sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan untuk mengatasi subordinasi perempuan yang sangat beragam, tergantung pada konteks budaya dan sosial politik. Kebutuhan strategis gender sebagaimana yang telah diidentifikasi Molyneux termasuk semua atau beberapa hal berikut: penghapusan pembagian kerja secara seksual, pengurangan kewajiban atas kerja-kerja domestik, menghapuskan diskriminasi,



mewujudkan kesetaraan politik, kebebasan memilih dan melahirkan anak (1985, hal 233)

Kebutuhan Praktis gender adalah kebutuhan yang diformulasikan dari kondisi kongkrit pengalaman perempuan, dengan posisi gender mereka dalam pembagian kerja secara seksual, dan dari sini kepentingan praktis gender untuk keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini diformulasikan secara langsung oleh perempuan yang berada dalam posisi-posisi ini daripada melalui intervensi eksternal. Oleh karena itu biasanya merupakan respon atas keperluan yang dianggap mendesak yang diidentifikasi perempuan dalam suatu konteks tertentu. Sebagaimana ditulis Molyneux, kebutuhan praktis ini umumnya tidak mempunyai tujuan yang strategis seperti perubahan posisi perempuan dan tidak juga mengugat bentuk-bentuk subordinasi meskipun kebutuhan praktis ini merupakan akibat dari hal tersebut. (1985, hal 233).

#### **1.3.2.1. Pendekatan Pembangunan**

Di negara-negara dunia ketiga khususnya sejak satu decade yang lalu, terdapat peningkatan kebijaksanaan, program, dan proyek yang dirancang untuk membantu perempuan. Sampai seberapa jauh perencanaan tersebut cocok bagi kebutuhan gender perempuan memerlukan suatu penelahan terhadap konsep pemikiran yang mendasari pelbagai pendekatan kebijakan tersebut. Tiap pendekatan mempunyai beberapa asumsi dan jawaban sendiri. Sampai saat ini terdapat 5 pendekatan antara lain :

##### **a. Pendekatan Kesejahteraan**

Pendekatan Kesejahteraan ini berdasar pada tiga asumsi. Pertama, bahwa perempuan dianggap sebagai penerima pasif daripada subyek dari pembangunan. Kedua, peran pengasuhan (*motherhood*) merupakan peran yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat. Ketiga, mengasuh anak adalah peran perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Meskipun pendekatan ini dianggap sebagai suatu program yang berorientasi pada "keluarga", pusat perhatiannya ditujukan pada kaum perempuan dalam kerangka peran reproduktif mereka, yang mengasumsikan bahwa laki-laki mempunyai peran





produktif dan mengidentifikasi hubungan ibu dan anak sebagai satuan perhatian mereka. Program pelaksanaannya adalah bantuan cuma-cuma secara top down dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun sampai saat ini pendekatan kesejahteraan mengalami perkembangan dan perluasan, tetapi asumsi utama dari pendekatan ini adalah memenuhi kebutuhan praktis gender dalam kaitan dengan peran reproduksi perempuan. Pada hakekatnya pendekatan ini mengidentifikasi perempuan sebagai persoalan ketimbang sumberdaya dan meletakkan pemecahan persoalan kesejahteraan keluarga di tangan perempuan, tanpa mempersoalkan persoalan “alamiah “mereka karena metode pelaksanaannya yang top down, maka pendekatan ini menimbulkan ketergantungan perempuan daripada membantu mereka agar lebih mandiri, program kesejahteraan tetap populer karena secara politis aman, tidak mempersoalkan peran yang secara tradisional diterima perempuan dalam pembagian kerja secara seksual. Asumsi-asumsi seperti itu cenderung mengesampingkan perempuan dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pembangunan yang besar yang menyediakan dana pembangunan dalam proporsi yang berarti. (Germaing, 1977). Fakta bahwa pendekatan kesejahteraan tidak tertarik untuk mengatasi kebutuhan strategis gender membuat banyak kelompok feminis di Amerika, para ilmuwan dan perencana yang prihatin atas kegagalan teori modernisasi.

#### **b. Pendekatan Keadilan**

Pendekatan ini menyadari bahwa perempuan adalah peserta aktif dalam proses pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduktif, mereka memberi sumbangan penting, walau sering tidak diakui bagi pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini dimulai dengan asumsi pokok bahwa strategi-strategi ekonomi sering berdampak negatif pada kaum perempuan, dan menyadari bahwa kaum perempuan harus dilibatkan “ dalam proses pembangunan dengan meningkatkan akses dan kesempatan kerja, karena itu pendekatan ini menyadari kebutuhan praktis gender dalam memperoleh pekerjaan. Seperti yang dijelaskan oleh Buvinic(1986), fokus utama pendekatan ini adalah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi serta dalam kelompok-kelompok sosial ekonomi. Pendekatan ini menemukan bahwa



asal usul subordinasi kaum perempuan tidak hanya terletak dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di lokasi pasar (market place), dan karena itulah pendekatan ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai suatu perwujudan keadilan.

Karena pendekatan ini mengurangi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pembagian kerja secara seksual, pendekatan keadilan ini memenuhi kebutuhan strategis gender. Program-program keadilan diidentifikasi persamaan hak. Gagasan pokok yang terkandung didalamnya adalah bahwa peran perempuan dalam proses pembangunan sering terabaikan, karena itu didalam suatu proses redistribusi, kaum laki-laki harus membagi sedemikian rupa sehingga kaum perempuan dari semua tingkatan sosial ekonomi bisa memperoleh manfaat, dan laki-laki dari semua tingkat sosial ekonomi dapat mengurangi kekuasaan mereka, jika perlu melalui diskriminasi positif.

### c. Pendekatan Anti Kemiskinan

Pendekatan anti kemiskinan atau anti poverty approach melihat ketidakadilan ekonomi antara perempuan dan laki-laki tidak dikaitkan dengan persoalan subordinasi, tetapi dengan kemiskinan, karena itu penekanannya bergeser dari upaya mnegurangi ketidaksamaan pendapatan. Buvinic (1983) berpendapat bahwa pendekatan ini merupakan versi lain dari pendekatan keadilan, yang muncul sebagai akibat keengganan lembaga-lembaga pembangunan untuk melakukan campur tangan terhadap cara hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam masyarakat tertentu.

Pendekatan ini memusatkan perhatian pada anti kemiskinan pada peran produktif perempuan. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa penghapusan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang memerlukan peningkatan produktivitas perempuan di rumah tangga berpenghasilan rendah. Dasar pendekatan ini adalah asumsi bahwa akae kemiskinan perempuan dan ketimpangannya dengan laki-laki disebabkan lemahnya kepemilikan tanah dan terhadap kepemilikan modal secara pribadi, dan diskriminasi seksual pada pasar kerja. Sebagai konsekuensinya, diperlukan peningkatan kebebasan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan di kalangan perempuan kelas bawah dengan membuka akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Perhatian pokok pada



kebutuhan strategis pada program KB untuk mengurangi kelahiran, program pendidikan dan ketenagakerjaan

#### **d. Pendekatan Efisiensi**

Pada pendekatan Efisiensi, tekanan bergeser dari perempuan ke pembangunan, dengan asumsi bahwa meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan di negara dunia ketiga, secara otomatis terkait dengan keadilan. Asumsi bahwa partisipasi ekonomi dapat meningkatkan status perempuan dan berkaitan dengan keadilan telah dikritik secara luas, seperti halnya pula pengidentifikasian factor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan teknologi yang kurang produktif, sebagai hambatan pokok bagi partisipasi perempuan. Maguire (1984), salah seorang diantaranya, berpendapat bahwa pergeseran dari sumber daya manusia yang ada untuk pembangunan disia-siakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Sementara apa yang disebut industri pembangunan menyadari bahwa perempuan sangat penting untuk keberhasilan usaha pembangunan secara keseluruhan, namun betapaun hal itu bukan lantas berarti bahwa pembangunan meningkatkan pembangunan.

Pergeseran ke pendekatan efisiensi ini seiring dengan kemerosotan ekonomi dunia yang terjadi pada pertengahan tahun 1970-an khususnya di Amerika Latin dan Afrika dimana masalah resesi diikuti dengan oleh jatuhnya harga barang-barang ekspor, proteksionisme, dan tanggungan hutang yang semakin membengkak. Untuk mengatasi keadaan tersebut kebijaksanaan penyesuaian dan stabilisasi ekonomi yang dirancang IMF dan Bank Dunia semakin banyak diterapkan pada beberapa negara. Kebijakan ini melalui pengaturan permintaan dan penawaran mengakibatkan realokasi sumber daya untuk dapat memperbaiki keseimbangan neraca pembayaran, meningkatkan ekspor dan memperbaiki tingkat pertumbuhan.

Dengan meningkatnya efisiensi dan produktivitas akibat dari kebijakan penyesuaian structural (SAP), pendekatan ini hanya berarti pergeseran biaya dari ekonomi upahan ke ekonomi non upahan, khususnya dengan menggunakan waktu perempuan tanpa upah.



#### e. Pendekatan Empowerment (penguatan diri)

Pendekatan ini berkembang sebagai akibat ketidakpuasan terhadap pendekatan awal WID (Women In Development) seperti pendekatan keadilan, karena dianggap dikooptasikan terhadap pendekatan anti kemiskinan dan efisiensi. Namun pendekatan ini berbeda dengan pendekatan keadilan bukan saja dalam asal usulnya tetapi juga dalam sebab-sebab, dinamika dan struktur peniundasan perempuan yang diusutnya sebagai strategi, yang bermaksud merubah posisi perempuan di negara-negara dunia ketiga.

Pendekatan ini berdasarkan asumsi dasar yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan pembangunan yang mendasari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Dalam pendekatan ini berusaha mengidentifikasi kekuasaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal perempuan. Hal ini dikenal dengan sebagai hak untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan untuk mempengaruhi arah perubahan, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya materiil dan non materiil. Pendekatan ini tidak begitu menekankan "status" perempuan secara relatif terhadap laki-laki, seperti halnya pendekatan keadilan tetapi berupaya memberikan kekuasaan kepada perempuan melalui pendistribusian kembali kekuasaan didalam dan diantara masyarakat. Pendekatan ini juga mempersoalkan dua asumsi yang terkandung dalam pendekatan keadilan yaitu Pertama, bahwa pembangunan dengan sendirinya membantu setiap orang, dan Kedua, bahwa perempuan ingin diintegrasikan dalam arus utama suatu pembangunan model Barat, dimana mereka tidak punya pilihan untuk merumuskan jenis masyarakat yang mereka inginkan (UNAPCWD, 1979).

Perbedaan penting antara pendekatan empowerment dengan pendekatan keadilan adalah pada cara, dimana pendekatan empowerment berupaya untuk mencapai kebutuhan strategis gender secara tidak langsung melalui kebutuhan praktis gender. Beda dengan pendekatan keadilan yang melakukan pendekatan konfrontasi, pendekatan empowerment membangun basis kebutuhan praktis gender sebagai basis bagi landasan yang kuat untuk mencapai kebutuhan strategis gender.





### I. 3. 3. Teori-Teori Politik Internasional Berperspektif Feminis

Sandra Withworth (1994, dalam Smita Notosusanto, 1997) telah berusaha mengklasifikasikan teori-teori politik internasional berperspektif feminis dalam tiga kategori, yaitu feminis liberal, feminis radikal, feminis post modern atau feminis kritis.

#### 1. Teori Feminis Liberal

Teori ini berpendapat bahwa perempuan tidak terwakili atau sama sekali tidak diikutsertakan dalam semua aspek kehidupan. Kaum feminis liberal yang mengkaji politik internasional biasanya berusaha untuk a) membuktikan ketidakterwakilan perempuan dalam politik internasional serta sebab-sebab dan akibat-akibatnya. b) membuktikan bahwa perempuan telah berpartisipasi bahkan menentukan *outcome* suatu proses politik internasional walaupun tidak tercantum dalam pemberitaan media massa maupun laporan pemerintah. Pendekatan feminis liberal terhadap politik internasional dianggap memiliki kelemahan. Pertama, pendekatan ini mengasumsikan bahwa ketidakterwakilan perempuan dalam politik internasional merupakan penyebab utama ketidakadilan yang dialami perempuan politik internasional. Jadi pendekatan ini menyimpulkan bahwa kalau jumlah perempuan sebagai aktor publik internasional ditingkatkan sesuai dengan prosentase penduduk perempuan, maka dengan sendirinya ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan akan lenyap. Yang menjadi masalah ada peningkatan kuantitas perempuan dalam politik tidak selalu dapat merubah struktur yang memang telah berciri patriarkis dan telah melembagakan posisi subordinat perempuan dalam segala bidang. Kedua, pendekatan ini pada dasarnya menerima pembagian lingkup publik dan privat dengan hanya meneliti ketidakterwakilan perempuan di dunia publik atau di dunia tradisional. Akibatnya pendekatan ini justru melembagakan dualisme yang sebenarnya menjadi akar subordinasi perempuan dalam hirarki hubungan gender. Pendekatan ini tidak menanyakan dualisme tersebut dengan merombak definisi politik sebagai suatu aktivitas yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas-aktivitas dan kejadian yang secara tradisional berada dalam lingkup privat.



## 2. Feminis Radikal

Pendekatan ini menekankan pada perbedaan struktural antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan penilaian yang lebih positif terhadap ciri-ciri feminin daripada ciri-ciri maskulin. Penganut pendekatan ini mengasumsikan bahwa ciri-ciri yang dimiliki perempuan baik secara biologis maupun gender dapat memberikan sumbangan yang lebih positif kepada pemahaman politik internasional. Pendekatan ini menganggap bahwa perang dan kekerasan diciptakan oleh nilai-nilai maskulin dan hanya dapat dihentikan oleh sifat-sifat feminin (*nurturer*). Partisipasi politik sangat diperlukan dalam pendekatan ini, karena peran perempuan dalam politik akan mengubah ciri politik internasional dan mengikutsertakan isu-isu baru seperti lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, dan sebagainya. Kelemahan pendekatan ini pada kecenderungannya untuk memusatkan perhatian pada perbedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki. Dikotomis secara deterministik ini akan melanggengkan stereotip antara perempuan dan laki-laki sehingga tidak bisa merubah pola relasi gender laki-laki dan perempuan.

## 3. Feminis Post-Modern

Pendekatan ini berusaha menolak pendekatan-pendekatan terdahulu dengan berusaha melakukan dekonstruksi total tidak saja terhadap pola relasi dan definisi gender, tetapi terutama pada definisi perempuan itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, tidak ada satupun subyek dan gagasan yang memiliki identitas yang berdiri sendiri, terpisah dari latar belakang sosial, politik, budaya, dan sejarah. Aliran ini bermanfaat untuk kajian politik internasional, karena berusaha untuk membebaskan pembahasan mengenai perempuan dan politik internasional dari berbagai konsep yang sebelumnya dianggap wajar baik dalam lingkup politik internasional maupun dalam lingkup feminisme. Dengan demikian tidak ada satupun definisi "perempuan" atau "gender" yang ditentukan hanya dari perspektif perempuan maupun laki-laki. Lebih jauh lagi pendekatan feminis post-modern ini dapat membantu usaha untuk merekonstruksi proses pembentukan identitas gender dan pelebagaan identitas ini dalam lingkup politik internasional.



Kelemahan pendekatan ini menurut Whitworth juga mengungkapkan bahwa relativitas yang menjadi inti pendekatan ini justru mempersulit usaha untuk mencari jalan yang dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam politik internasional. Kegiatan ini dekonstruksi terhadap semua konsep, gagasan, dan subyek penelitian seringkali menjadi fokus utama pendekatan ini sehingga cenderung mengabaikan usaha nyata untuk mencari dan membentuk alternatif pendekatan dengan solusi yang nyata.

#### 1.3.4. Konstruksi Politik Perempuan dalam masa Orde Baru

Relevansi perlunya untuk memahami posisi perempuan pada masa Orde Baru adalah karena masih bertahannya konstruksi perempuan tersebut akibat proses hegemoni yang telah berlangsung lama. Untuk melihat konstruksi perempuan di masyarakat Indonesia menggunakan pendekatan Julia S Kusuma (1991) dengan konsep "*state ibuisism*". Dalam membuka konstruksi teoritis untuk menganalisa ibuisme negara, Julia meminjam konsep pengiburumahtangan dari Maria Mies (1986, dalam Suryakusuma, 1991), konsep "*ibuisism*" dari Madelon Djajadiningrat (1987), serta pendekatan analisa kata-kata kunci (key word) terhadap negara yang dikembangkan oleh Michael Van Langenberg (1986). Ketiga konsep ini meliputi aspek-aspek ekonomi, budaya dan politik yang mempengaruhi konstruksi sosial keperempuanan di Indonesia.

Istilah pengiburumahtangan yang digunakan Mies, mengaitkan hubungan produksi dengan ideology gender dan dengan kerja produktif, Mies mengartikannya sebagai :

*" suatu proses dimana perempuan didefinisikan sebagai ibu rumah tangga, yang penghidupannya tergantung penghasilan suami, terlepas dari kenyataan apakah mereka secara de facto, ibu rumah tangga atau bukan. Definisi sosial ibu rumah tangga adalah pasangan definisi sosial laki-laki sebagai pencari nafkah, terlepas dari sumbangan kongkret suami terhadap mata pencaharian keluarga" (Mies, 1982)*

Dalam proses ini, perempuan dikotakkan menjadi ibu rumah tangga yang tergantung, tidak produktif dan yang memberikan tenaga kerja domestik secara gratis. Hasilnya adalah keperempuanan yang terisolir, dipisahkan menjadi atom yang



berdiri sendiri, tidak terorganisasi dan terampas dari kehidupan politik dan ekonomi. Ini membuat perempuan menempati posisi yang subordinat terhadap laki-laki. Mies mengasosiasikan proses pengiburumahtangaan ini dengan perkembangan kapitalisme, dimana "*kebangkitan*" keluarga batih dan ibu rumah tangga sebagai jantung hatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi yang didorong intervensi negara dan gereja dalam konteks negara barat.

Pengiburumahtangaan adalah strategi reproduksi angkatan kerja, sekaligus mendorong ibu rumah tangga yang sudah dijinakkan untuk menjadi agen konsumsi. Mies menunjukkan pekerjaan rumah tangga adalah proses mutlak bagi proses akumulasi dan proses pengiburumahtangaan adalah proses "eksternalisasi" biaya (biaya yang tidak dihitung) yang seharusnya dibayarkan kaum pemilik modal (Mies, 1986 dalam Suryakusuma, 1991), dimana kerja ibu rumah tangga dianggap "*gratis*" padahal kerja yang mereka lakukan adalah vital untuk proses kapitalisme. Laki-laki yang "*bebas*" menjual tenaga mereka merupakan akibat "ketidakbebasan" ibu rumah tangga. Jadi proletarisasi laki-laki bertumpu pada pengiburumahtangaan perempuan.

Berbeda dengan analisa Mies yang bersifat ekonomistik, Madelon Djajadiningrat menformulasikan suatu model kultural-historis. Ia mengidentifikasi ideologi ibuisme yang berkembang pada akhir abad 19 dan di awal abad 20 yang merupakan gabungan nilai-nilai borjuis kecil (*petit bourgeois*) Belanda dan priyayi tradisional. Ibuisme waktu itu adalah ideologi yang mengijinkan tindakan seorang ibu, jika dilakukan demi kepentingan keluarga, kelompok, kelas, perusahaan, atau negara. (Dajadiningrat, 1986).

Dalam proses membangun konsep ibuisme ini, negara menciptakan lembaga-lembaga korporatif untuk menjangkau seluruh perempuan Indonesia melalui penyeragaman organisasi perempuan dari tingkat pusat sampai daerah dan di level pemerintahan, yaitu PKK dan Dharma Wanita. Melalui lembaga ini negara melakukan hegemoni untuk mengontrol perempuan, bahkan laki-laki melalui perempuan-istri untuk kepentingan stabilitas nasional dan pembangunan.





#### 1. 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pemahaman dan wacana pengurus inti organisasi perempuan partai politik tentang isu pemberdayaan perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akses organisasi perempuan terhadap kebijakan partai secara keseluruhan.
3. Untuk mendesiminasikan prediksi peluang artikulasi kepentingan perempuan melalui pemahaman pengurus organisasi perempuan parpol, akses organisasi perempuan terhadap parpol, dan kegiatan organisasi tentang isu pemberdayaan perempuan.

#### 1. 5. Kontribusi Penelitian

Diharapkan, penelitian ini akan dapat berkontribusi dalam;

1. Memperkaya wacana para aktivis perempuan baik yang bergerak di dunia akademik maupun di lapangan seperti partai politik dan NGO
2. Memberikan input bagi gerakan perempuan dalam menentukan posisi politik dan strategi pemberdayaan politik perempuan.
3. Memberikan masukan bagi partai politik, khususnya dapat digunakan bagi pendidikan politik perempuan .

#### 1. 6. Metode dan Prosedur Penelitian

Metodelogi penelitian dalam studi ini menggunakan metode studi kasus dari Yin (1994) untuk mengkonstruksikan setiap kasus yang ada sebelum dianalisa dan digambarkan perbandingan umumnya. Dikatakan studi kasus banyak (*multiple cases*) karena menggunakan lebih dari satu kasus atau unit yang diteliti. Dalam penelitian ini lima organisasi sebagai studi kasus, yang diteliti kemudian dikomparasikan dengan memperhatikan kesamaan atau perbedaan yang ada antar kasus.

Pengumpulan data untuk setiap studi kasus lebih ditekankan pada pengembangan dan penggunaan dari diskusi terfokus dengan para aktivis partai yang duduk dalam kepengurusan seperti ketua bidang pemberdayaan perempuan atau ketua organisasi perempuan sayap partai. Keuntungan menggunakan



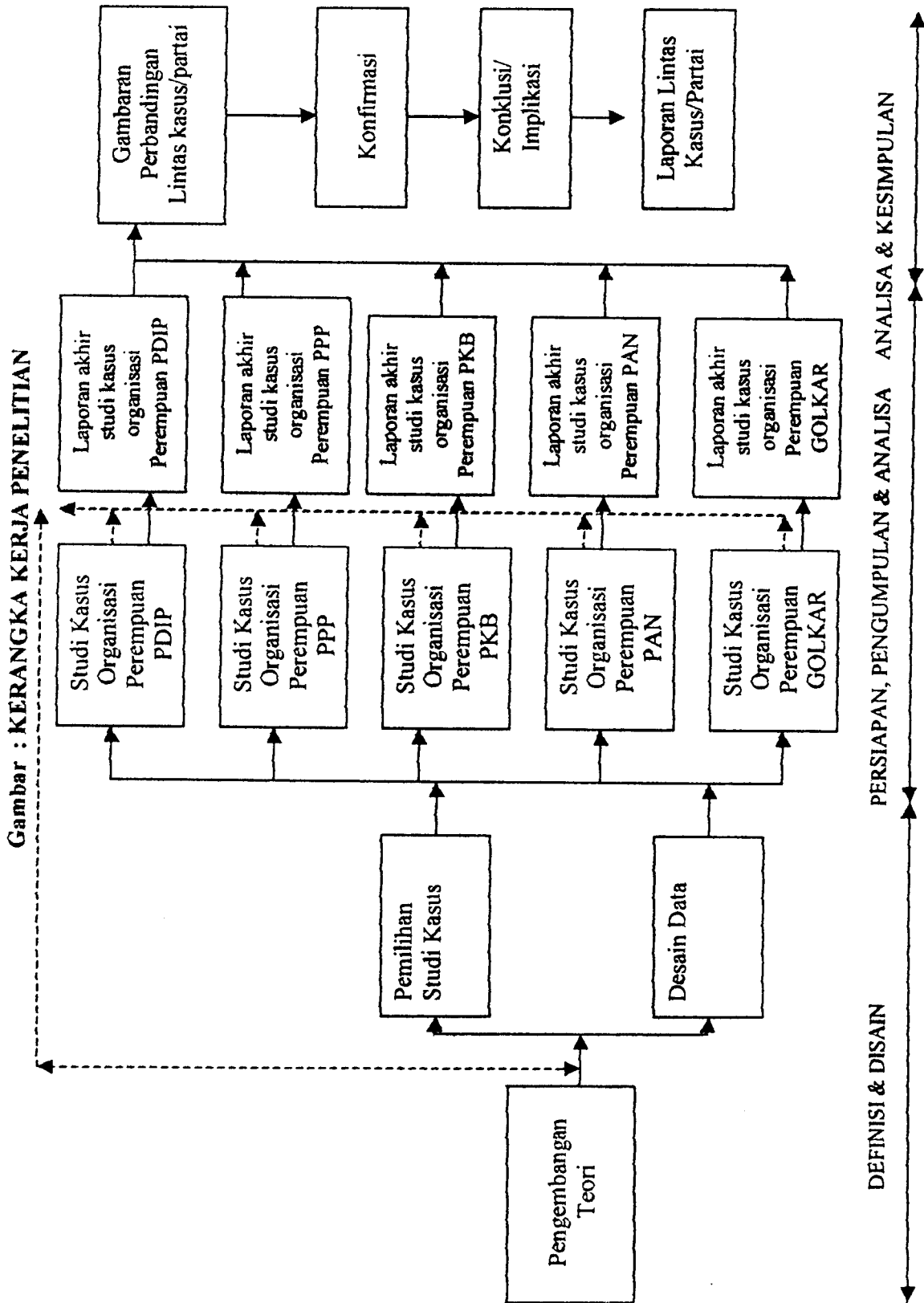
kelompok diskusi terfokus adalah hasil diskusi merupakan konsensus bersama anggota diskusi, dalam penelitian ini diharapkan hasil diskusi adalah menjadi konsensus pengurus organisasi perempuan partai mengenai pemahaman, interpretasi kebijakan, dan implementasi kegiatan partai.

Analisis akan dimulai dengan *critical anlysis* terhadap platform dan program-program pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan oleh partai tersebut. Kemudian untuk melihat tingkat *discourse capable* dan tingkat kesadaran terhadap *women equity* dengan model *focus group discussion*.

### **1.7. Lokasi Penelitian**

Sampel penelitian ditentukan secara *purposive-sampling* yaitu berdasarkan pada 5 partai terbesar di tingkat wilayah kotamadya (tingkat cabang) di Surabaya yaitu PDIP, PKB, PAN, Golkar dan PPP. Ukuran terbesar ditentukan berdasarkan kemenangan perolehan suara pada Pemilu tahun 1999 kemarin.





## BAB II GAMBARAN UMUM

### II. 1. Keberadaan Organisasi Perempuan

Dari 5 partai terbesar di Surabaya tersebut, tiga partai telah menyatakan mempunyai Organisasi Sayap Khusus Perempuan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nama Pergerakan Perempuan PKB, Partai Golkar dengan nama Persatuan Perempuan Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nama Wanita Kesatuan. Sedangkan 2 partai lainnya, lembaga yang mewadahi isu Perempuan masih berbentuk Departemen Wanita, yaitu PAN dan PDIP.

**Tabel 1**  
**Keberadaan Organisasi Perempuan di Partai Politik**

Partai	Organisasi/Wadah yang mengurus isu Perempuan	Posisi Struktural	Sifat Organisasi
PKB	Pergerakan Perempuan PKB (PPKB) (tahun 1999)	Dibawah Departemen Wanita	Semi Otonom
PAN	Departemen Pemberdayaan Perempuan	Di bawah Ketua	Semi Otonom
PPP	Wanita Kesatuan (tahun 1988)	Dibawah Departemen Wanita	Tidak Otonom
PDIP	Departemen Wanita	Dibawah Ketua	Tidak Otonom
Golkar	Persatuan Perempuan Golkar (tahun 2002)	Dibawah Departemen Wanita	Semi Otonom

*Sumber: Data primer, dokumen partai, 2002*

Keseluruhan organisasi Perempuan yang sudah terbentuk dalam partai tersebut posisinya secara struktural dibawah Departemen Wanita atau Departemen Pemberdayaan Perempuan.

### II.2. Latar Belakang Terbentuknya Organisasi Perempuan

Dari hasil wawancara, munculnya PPKB dilatrbelakangi karena aktivis perempuan di PKB menyadari bahwa kepentingan perempuan dipartai kurang diakomodasi. Alasan lain dari munculnya lembaga ini karena masih sedikit sekali perempuan yang menjadi pengurus di jajaran kepengurusan partai. Sementara itu



kualitas SDM perempuan masih lemah, sehingga terbentuknya organisasi perempuan sebagai sarana pendidikan dan latihan ketrampilan berorganisasi bagi aktivis perempuan di PKB. Hal ini juga yang melatarbelakangi munculnya organisasi Wanita Kesatuan di PPP, dimana pembentukan organisasi ini diharapkan menjadi media belajar dan berkiprah aktivis perempuan di PPP dan Departemen Pemberdayaan Perempuan di PAN, yang melihat lembaga ini yang merupakan program Nasional yang merupakan media untuk pendidikan dan pengembangan perempuan. Sedangkan pada KPPG, menurut Keputusan DPP Golkar, pembentukan organisasi sayap perempuan ini diharapkan dapat menjangkau perempuan, karena berkaitan dengan visi Golkar yang bersifat terbuka. Karena Golkar selama ini sudah mengakar mulai dari pusat sampai desa-desa, maka diharapkan dengan terbentuknya KPPG di tiap-tiap daerah, cabang, maupun ranting akan meningkatkan peran perempuan di partai.

Tabel 2

#### Latar Belakang Pembentukan Organisasi/Lembaga Perempuan

Organisasi Perempuan	Latar Belakang Pembentukan
PPKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suara dan kepentingan perempuan kurang diakomodasi</li> <li>- Pengurus dari perempuan masih minim</li> <li>- SDM perempuan masih lemah sehingga perlu media berorganisasi</li> </ul>
PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program dari pusat</li> <li>- Pendidikan dan pengembangan perempuan</li> </ul>
Wanita Kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan media bagi perempuan untuk berkiprah</li> </ul>
KPPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memperluas jangkauan partai terhadap pemilih Perempuan</li> </ul>
Departemen Wanita PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program dari Pusat</li> </ul>

Sumber: Data primer, dokumen partai, 2002

### II.3. Visi dan Misi Organisasi Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara, menurut aktivis PPKB, visi dan misi pembentukan PPKB adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. Sedangkan untuk visi dan misi organisasi Wanita Kesatuan adalah mensosialisasikan "*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*" atau mensosialisasikan perbuatan





yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Aktivis perempuan PDIP melihat Departemen Wanita PDIP mempunyai visi dan misi mensukseskan Pemilu. Sementara itu aktivis KPPG melihat Perubahan Golkar yang terbuka, mandiri, demokratis, religius, solid serta mengakar dan responsive terhadap reformasi harus memperkuat basis perempuan sebagai visi dan misi KPPG. Visi dan Misi Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN adalah meningkatkan keberdayaan Perempuan.

**Tabel 3**  
**Visi dan Misi Organisasi Perempuan**

<b>Organisasi Perempuan</b>	<b>Visi dan Misi</b>
PPKB	Membangun Keadilan dan Kesetaraan Gender
Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN	Pemberdayaan Perempuan
Wanita Kesatuan	Mensosialisasikan Amar Ma'ruf nahi Mungkar
Departemen Wanita PDIP	Mensukseskan Pemilu
KPPG	Membangun basis perempuan

Sumber; Data primer, 2002

### 11.3. Tujuan Pembentukan Organisasi Perempuan

Sebagian besar tujuan pembentukan Partai adalah untuk Kemenangan Pemilu Partai sebagai tujuan jangka pendek. Bahkan aktivis Wanita Persatuan menyatakan dengan tegas bahwa salah satu tujuan dari organisasi perempuan Wanita Kesatuan adalah memperjuangkan Hamzah Has sebagai presiden. Pengurus Departemen Wanita PDIP menyebutkan tujuan organisasi perempuan PDIP tersebut adalah mempercepat terbentuknya koperasi mega gotong royong dan untuk mempersiapkan kader perempuan untuk duduk di legislatif. Sedangkan KPPG menyatakan bahwa tujuan umum KPPG adalah memperkuat dan memperluas basis pendukung Partai Golkar, terutama kelompok strategis perempuan yang berorientasi pada karya dan kekarya. Sedangkan tujuan lainnya adalah mempertegas komitmen partai Golkar terhadap pemberdayaan kader perempuannya serta dalam rangka menyerap, memadukan, mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat pada umumnya dan kaum



perempuan pada khususnya. Tujuan didirikan PPKB adalah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur serta mewujudkan tatanan sosial dan politik nasional yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, dengan cara meningkatkan kesadaran politik dan hukum di kalangan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan lainnya adalah mencetak kader-kader politik perempuan. Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN bertujuan menyediakan pimpinan-pimpinan perempuan yang handal dan berkualitas dan mampu menjadi penyeru, pembina, penyuluh, penggerak, dll, serta berperan dalam pembangunan di bidang sosial, hukum, ekonomi, politik, pendidikan, yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Tujuan ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pengajian yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Antar Pengajian.

**Tabel 4**  
**Tujuan Organisasi/Lembaga Perempuan**

Organisasi Perempuan	Tujuan
PPKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur serta mewujudkan tatanan sosial dan politik nasional yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.</li> <li>- Meningkatkan kesadaran politik dan hukum di kalangan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara</li> <li>- Mencetak kader-kader politik perempuan.</li> </ul>
Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN/FORSAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan pimpinan-pimpinan perempuan yang handal dan berkualitas dan mampu menjadi penyeru, pembina, penyuluh, penggerak, dll, serta berperan dalam pembangunan di bidang sosial, hukum, ekonomi, politik, pendidikan, yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.</li> </ul>
Wanita Kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenangan Pemilu</li> <li>- Menjadikan Pak Hamzah Has menjadi presiden</li> </ul>
Departemen Wanita PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat terbentuknya koperasi mega gotong royong</li> <li>- Mempersiapkan kader perempuan untuk duduk di legislatif</li> <li>- Kemenangan Pemilu</li> </ul>
KPPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat dan memperluas basis pendukung perempuan</li> <li>- Memperjuangkan dan mengartikulasikan kepentingan perempuan</li> <li>- Kemenangan Pemilu</li> </ul>

Sumber; Data primer, dokumen partai, 2002



#### II.4. Pemahaman Tentang Pentingnya Organisasi Perempuan

Seluruh aktivis perempuan parpol menyatakan bahwa keberadaan organisasi perempuan adalah penting. PPKB menyatakan bahwa organisasi ini sangat penting selama kepentingan perempuan belum terakomodasi oleh partai, maka perlu ada organisasi perempuan sebagai sarana meningkatkan artikulasi kepentingan perempuan dalam partai. Selama ini perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga harus berjuang untuk duduk dalam kepengurusan dan perwakilan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini PPKB sebagai sarana untuk mendukung dan mempersiapkan aktivis perempuan untuk mendapatkan peluang dalam kepengurusan partai dan perwakilan masyarakat.

KPPG melihat pentingnya organisasi perempuan Golkar ini untuk menjangkau basis perempuan. Sedangkan aktivis PPP dan PDIP melihat pentingnya organisasi perempuan lebih karena jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki, sehingga merupakan potensi suara yang cukup tinggi. Pengurus PAN melihat bahwa pembentukan organisasi perempuan sangat efektif untuk memunculkan kader-kader perempuan yang berkualitas.

Tabel 5  
Tingkat Kepentingan Organisasi Perempuan

Organisasi Perempuan	Tingkat Kepentingan
PPKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat penting selama kepentingan perempuan belum terakomodasi oleh partai</li> <li>- Sebagai sarana untuk bargaining dan mendapatkan akses pengambilan keputusan</li> </ul>
Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN	Penting sekali, untuk memunculkan kader perempuan
Wanita Kesatuan	Sangat penting, karena perempuan adalah aset yang besar jumlahnya
Departemen Wanita PDIP	Penting, karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
KPPG	Penting, karena untuk menjangkau basis perempuan

Sumber: Data primer, 2002



## II.5. Evaluasi Terhadap Organisasi Perempuan

Dengan melihat perjalanannya, PPKB melihat salah satu hal yang perlu dicermati dari PPKB adalah meskipun telah menyatakan sebagai partai terbuka, tapi selama ini anggota PPKB masih internal NU, yaitu dari Fatayat NU dan Muslimat NU. Diharapkan pada perjalanan nantinya banyak anggota yang bukan dari NU, atau bahkan bukan dari muslim. Sedangkan Departemen Pemberdayaan perempuan PAN melihat perlunya menfokuskan pada pendidikan/penyadaran politik bagi perempuan, bukan pengajian saja. Selama ini juga kerja departemen ini kurang sistematis dan koordinatif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu kesinambungan antara program pusat dengan daerah.

Departemen Wanita PDIP melihat lembaga ini belum sempurna, masih perlu ada peningkatan-peningkatan secara kontinyu baik itu dimulai dari pendidikan, pelatihan, dll. Sehingga dapat meningkatkan peran dari organisasi perempuan itu sendiri. Sedangkan Departemen Pemberdayan Perempuan PAN juga merasakan perlu pembenahan dan perbaikan pada kepengurusan dan program. Sedangkan KPPG belum bisa dievaluasi, karena pembentukannya baru satu bulan dibentuk.

Tabel 6

### Evaluasi Terhadap Organisasi Perempuan

Organisasi Perempuan	Otokritik
PPKB	Meskipun partai terbuka, tapi selama ini anggota PPKB masih internal NU, yaitu dari Fatayat NU dan Muslimat NU
Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan yang dilakukan harus lebih fokus pada pendidikan/penyadaran politik bukan pengajian.</li> <li>- Kerjanya kurang sistematis dan koordinatif.</li> <li>- Belum ada kesinambungan antara Pusat dan Wilayah/Cabang</li> </ul>
Wanita Kesatuan	Perlu perbaikan dan pembenahan pada program dan kepengurusan
Departemen Wanita PDIP	Belum sempurna, masih perlu ada peningkatan-peningkatan secara kontinyu baik itu dimulai dari pendidikan, pelatihan, dll. Sehingga dapat meningkatkan peran dari organisasi perempuan itu sendiri.
KPPG	Masih baru, belum bisa dilihat keberhasilan/kekurangannya

Sumber, Data primer, 2002





### BAB III

#### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Menurut Habermas (1995), pemahaman setiap orang tergantung kepada tingkat pengetahuan maupun pengalaman sehari-harinya orang tersebut. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pemahaman para aktivis perempuan partai politik terhadap wacana kesetaraan gender yang terwakili dari program-program nya sangat tergantung pada sejauhmana para aktivis partai politik tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup perihal "*women equity*" maupun pengalaman hidupnya sebagai perempuan. Bila dalam pengalaman kesehariannya sebagai perempuan relatif memiliki problem ketidakadilan gender, menyadarinya, kemudian bermaksud menolaknya, maka sebenarnya ia telah berdaya dan masuk dalam kategori masyarakat yang "*Well Informed*".

Berdasarkan pemahaman teori di atas, maka untuk mengetahui bagaimana peluang artikulasi kepentingan perempuan melalui partai politik dapat dilihat dari pemahaman dan pengetahuan pengurus organisasi perempuan partai politik, pemahaman terhadap platform partai mengenai pemberdayaan perempuan dan implementasi pemberdayaan perempuan.

#### III.1. Pemahaman Aktivis Perempuan Parpol terhadap Gender Perspektif

##### III.1.1. Pemahaman dan Kesadaran Analisa Gender

Analisa Gender telah dianggap sebagai alat analisis yang paling baik untuk memahami berbagai persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Menurut Oakley (1972, dalam Fakih, 1996), konsep gender, adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan lain sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidaklah kodrat, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, dan



sebagainya, sementara itu ada juga perempuan yang kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya.

Berbagai pandangan dan anggapan yang berbasis pada gender tersebut ternyata menimbulkan berbagai ketidakadilan, karena gender yang berlaku dimasyarakat dianggap sebagai kodrat dan digunakan sebagai acuan dalam pembagian peran dan relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang dominasi bias patriaki. Menurut Fakih (1998), ada lima bentuk ketidakadilan gender yang dapat didiskripsikan antara lain, diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi terhadap perempuan, marginalisasi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban yang berlebihan pada perempuan.

Hasil diskusi terfokus, dapat disimpulkan bagaimana pandangan para aktivis partai politik dan bagaimana pemahamannya dalam melihat persoalan perempuan. Dari lima organisasi partai yang diteliti, aktivis dari 3 organisasi partai politik menyatakan bahwa persoalan ketidakberdayaan perempuan disebabkan lebih karena budaya. Budaya masyarakat Jawa yang memandang perempuan sebagai “*kanca wingking*” dan perempuan yang tampil di masyarakat dianggap tabu menyebabkan perempuan tidak bisa eksis di partai politik. Hal ini dapat dilihat dari petikan diskusi yang muncul pada aktivis PPP

*“Yang melatarbelakangi pengurangan perempuan di organisasi adalah karena budaya, dimana masih dianggap tabu, dan ini tergantung pada kondisi daerahnya dan partai itu sendiri. Walaupun sebenarnya P3 itu ada rekomendasi untuk tetap melibatkan wanita masuk dalam struktur organisasi partai yang ada, tapi wanita hanya untuk kegiatan kewanitaan”*

Kalimat di atas dapat di lihat bahwa penyebab rendahnya partisipasi perempuan di partai politik dan sedikitnya perempuan yang menduduki posisi struktural partai karena budaya masyarakat dan partai yang masih menganggap perempuan tabu menjadi aktivis partai politik dan beraktivitas di luar rumah. Aktivis partai Golkar juga melihat bahwa sedikitnya peran perempuan dalam parpol karena perempuan sendiri masih menganggap tabu untuk berpolitik.

Pernyataan ini juga terjadi pada diskusi di PKB, yang melihat bahwa budaya masyarakat tentang peran perempuan adalah menjadi konco wingking.

*“Budaya masyarakat masih melihat perempuan lemah, lemah lembut, tidak perlu sekolah, karena nantinya perannya di dapur”*

Pada partai PDIP dan PAN, melihat bahwa kodrat perempuan adalah peran domestik. Oleh karena itu perempuan dianggap yang bertanggung jawab terhadap beban domestik meskipun berperan di publik. Dalam bermasyarakat, perempuan harus bisa menyeimbangkan peran publik dan domestik. Menurut aktivis dari kedua partai ini anak harus menjadi perhatian utama perempuan. Hal ini dapat dilihat dari petikan diskusi dengan aktivis PDIP

*“.....perempuan harus mencurahkan perhatian pada keluarga dulu, baru setelah anak-anak dewasa baru bisa berperan di publik, jangan sampai terbalik, karena berhasil tidaknya anak-anak tergantung pada ibu/perempuan”*

Pemahaman dan persepsi ini juga dapat dilihat dari hasil diskusi dengan aktivis PAN, yang melihat bahwa peran utama perempuan adalah mendidik anak.

*“Secara pribadi apapun namanya, perempuan kalau keluar rumah harus memperhitungkan bahwa saya meninggalkan rumah termasuk anak-anak harus dipikirkan dulu.....”*

Hasil diskusi pada lima partai dapat disimpulkan bahwa tidak semua aktivis parpol melihat peran dan persoalan perempuan dalam “gender perspektif”. Pemahaman gender yang dilihat sebagai kodrat oleh pengurus dari PAN dan PDIP menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap peran laki-laki dan perempuan yang terjadi sekarang merupakan kodrat atau pemberian Tuhan, bukannya konstruksi masyarakat yang diartikulasikan dalam bentuk budaya dan nilai yang berlaku di masyarakat. Bahkan pelanggaran budaya ini semakin diperkuat melalui interpretasi ajaran agama yang bias male (Engineer, 1994).

Pelanggaran ini juga dilakukan oleh negara, di mana pada masa Orde baru secara sistematis memperlakukan state ibuism--domestikasi dan depolitisasi perempuan dengan menciptakan struktur, memimpin proses akumulasi, dan mendefinisikan suatu ideology gender--untuk menjaga kepentingan negara. (Suryakusuma, C. Julia, 1994). Istilah ini diambil dari konsep



pengiburumahtangaan dari Maria Mies (1986, dalam Suryakusuma, 1991), yang mengaitkan hubungan produksi dengan ideology gender dan dengan kerja produktif serta konsep Madelon Djayadiningrat (1986, dalam Suryakusuma, 1991) yang berangkat dari ideology yang mengizinkan dan mendefinisikan perempuan demi kepentingan keluarga, kelompok, kelas, perusahaan ataupun negara. Proses kooptasi dilakukan melalui organisasi keperempuanan yang berakar pada pemerintah pusat ( PKK dan Dharma Wanita). Akibatnya adalah perempuan menjadi tergantung, terisolir, tidak terorganisir, dan terampas dari kekuatan politik dan ekonomi.

Pemahaman dalam melihat pembagian peran perempuan menghasilkan cara pandang melihat persoalan perempuan. Dari pengurus partai yang melihat pembagian peran laki-laki dan perempuan merupakan kodrat, ternyata melihat persoalan perempuan lebih pada persoalan kualitas perempuan itu sendiri. Mereka menganggap persoalan rendahnya partisipasi perempuan di publik disebabkan karena perempuan itu sendiri yang tidak mempunyai ketrampilan dan kualitas dan ketidakmauan dalam menggunakan peluang. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi terfokus pada PDIP

*“ Wanita sekarang sudah diberikan peluang, tinggal kualitasnya saja yang perlu ditingkatkan. Karena sudah diberi peluang, permasalahannya mau tidak menggunakan peluang tersebut”*

Hal ini juga dipahami oleh aktivis PAN, yang melihat bahwa kesadaran politik perempuan yang rendah dikarenakan kemalessan perempuan itu sendiri bukan karena budaya atau sistem yang berada di luar perempuan yang mengakibatkan kondisi perempuan saat ini.

*“ Kesadaran politik perempuan rendah,.....saya sering menganjurkan mereka membaca Koran, mencari informasi. Tapi mereka males.....”*

Sebaliknya, aktivis partai yang melihat pembagian peran laki-laki dan perempuan dipengaruhi budaya, akan melihat persoalan ketidakadilan perempuan karena gender yang berlaku dimasyarakat. Anggapan masyarakat yang melihat perempuan lemah, ulet, telaten mengakibatkan adanya pembagian kerja yang menyebabkan persoalan ketidakadilan. Misalnya yang dicontohkan pada diskusi di PKB, yang melihat budaya memberikan peran kepala rumah tangga pada laki-laki sehingga

laki-laki harus selalu diutamakan dalam pendidikan. Anggapan bahwa perempuan telaten, ulet, lemah lembut sehingga harus dikasihani dan dianggap cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan.

*“ Dari segi pendidikan perempuan kalah, karena laki-laki selalu dituntut untuk berpendidikan tinggi, karena nantinya akan menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah.....dalam undang-undang disebutkan bahwa kepala keluarga adalah laki-laki, padahal tidak selalu demikian di masyarakat”.*

Aktivis PPP melihat bahwa rendahnya partisipasi perempuan di publik khususnya di parpol karena usaha –usaha dari partai sendiri yang belum maksimal.

**Tabel 7**  
**Cara Pandang Melihat Persoalan Perempuan**

Partai	Gender Perspektif	Melihat Persoalan Perempuan
PDIP	Peran domestik adalah kodrat	Partisipasi perempuan rendah karena perempuan sendiri yang tidak berkualitas dan tidak mau menggunakan peluang
PKB	Peran ditentukan oleh budaya	Budaya membuat perempuan terkungkung dalam peran domestik dan sulit untuk berpartisipasi dalam publik/masyarakat
PAN	Peran domestik adalah kewajiban perempuan	Kesadaran politik perempuan rendah karena kemalesan perempuan itu sendiri
PPP	Peran perempuan ditentukan oleh budaya	Peran perempuan dalam parpol rendah karena budaya dan partai yang masih belum mengakomodasi perempuan
Golkar	Budaya yang lebih berpengaruh pada peran perempuan	Perempuan berpolitik dan tampil di depan masih dianggap tabu.

Sumber: Data Primer, 2002

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemahaman persoalan perempuan dengan tidak menggunakan perspektif gender akan melihat persoalan ketidakadilan perempuan dari perempuan itu sendiri. Pemahaman ini berasumsi bahwa munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan itu sendiri, dan hal ini menyebabkan ketidakmampuan bersaing dengan laki-laki dalam pembangunan. Pemahaman yang menganggap persoalan peran perempuan yang rendah karena budaya memandang persoalan tersebut dalam kacamata gender –konstruksi masyarakat yang melatarbelakangi peran dan relasi laki-laki dan perempuan– akan melihat melihat persoalan ketidakadilan gender bukan terletak pada perempuan tetapi



dikarenakan ideology, system, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender (*gender inequalities*) (Fakih dalam Julia C. Mosse, 1996).

Pendekatan yang “memusatkan perhatian pada perempuan” dalam analisa Moser (1996) adalah termasuk dalam pendekatan “pengentasan kemiskinan “dan “pendekatan efisiensi”. Dalam pendekatan kemiskinan di mana dasar pemikirannya adalah perempuan menjadi miskin karena mereka tidak produktif sehingga perlu diciptakan :program peningkatan pada perempuan”. Pada pendekatan Efisiensi berasumsi bahwa pembangunan mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan. Kedua pendekatan ini analisisnya lebih memusatkan pada perempuan , dan kegiatannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan. Pendekatan ini diadopsi dari aktivis partai, seperti yang didapat dari diskusi dengan aktivis PAN

*“ Banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses pada pekerjaan sehingga menjadi Pembantu Rumah Tangga karena pendidikannya rendah, sehingga.....”*

Aktivis perempuan pada PDIP juga melihat kualitas pendidikan perempuan rendah, sehingga yang harus diatasi dulu adalah peningkatan pendidikan formal dan informal, karena dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan lingkungan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dsb.

Tabel 8

## Pemecahan Masalah Perempuan

Akar Masalah Perempuan	Pemecahan Masalah	Pendekatan Feminisme
Pendidikan rendah	Peningkatan pendidikan formal maupun informal sehingga bisa meningkatkan kepekaan masalah masyarakat. ( ekonomi, sosial, budaya, politik dsb).	Pendekatan Kesejahteraan
Kemiskinan	Perlu program peningkatan ekonomi khusus perempuan	Pendekatan Kesejahteraan
Perempuan kurang dilibatkan dalam kegiatan parpol	Mengajak wanita untuk menyelesaikan masalah, baik internal maupun eksternal parpol dan memberikan kepercayaan kepada perempuan	Pendekatan Efisiensi
Budaya	Menghilangkan budaya dimasyarakat bahwa perempuan tabu untuk berpolitik	Pendekatan Keadilan Gender
Struktur Pengambilan Keputusan yang didominasi laki-laki	Memberikan peluang pada perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik	Pendekatan Keadilan Gender

Sumber: Data Primer, 2002

Pendekatan lainnya yang berseberangan dengan pendekatan diatas adalah pendekatan yang menggunakan analisa gender yaitu permasalahan disebabkan ketidakadilan gender, dimana struktur, system, ideology yang didominasi patriaki menyebabkan ketidakadilan perempuan. Oleh karena itu maka program yang diberlakukan bukan sekedar untuk menjawab "*kebutuhan praktis perempuan*" atau mengubah kondisi perempuan, tetapi lebih pada menjawab "*kebutuhan strategis perempuan*", yakni memperjuangkan perubahan posisi perempuan , termasuk menentang hegemoni dan melawan wacana terhadap ideologi yang telah mengakar dalam keyakinan baik laki-laki maupun perempuan.

Hasil diskusi menunjukkan hanya dua pendapat yang menyatakan bahwa persoalan perempuan karena budaya yang meletakkan perempuan pada posisi domestik, serta system yang didominasi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari diskusi pada aktivis PKB

*" Meskipun tingkat pendidikan perempuan tinggi, tetapi perempuan tetap tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan, sehingga wanita selalu di tingkat bawah. Hal ini karena penentu kebijakan adalah pria sehingga kondisi perempuan tidak akan berubah".*

Para aktivis perempuan Golkar melihat bahwa budaya masyarakat yang dominan menyebabkan perempuan enggan untuk berpolitik, oleh karena itu program yang utama dalam merubah kondisi perempuan adalah merubah budaya tersebut.

*" Yang terpenting dalam dua tahun kedepan adalah menggerakkan pikiran perempuan, bahwa perempuan tidak tabu dalam bidang politik..."*

Dalam kerangka pemecahan masalah di atas, dapat dilihat bahwa pada pendekatan Kesejahteraan dan Efisiensi lebih memenuhi kebutuhan praktis gender. Seperti yang didiskripsikan oleh Maxine Olyneux (1985), kebutuhan Praktis gender adalah kebutuhan yang diformulasikan dari kondisi kongkrit pengalaman perempuan, dengan posisi gender mereka dalam pembagian kerja secara seksual, dan dari sini kepentingan praktis gender untuk keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini diformulasikan secara langsung oleh perempuan yang berada dalam posisi-posisi ini daripada melalui intervensi eksternal. Oleh karena itu biasanya merupakan respon atas



keperluan yang dianggap mendesak yang diidentifikasi perempuan dalam suatu konteks tertentu. Kebutuhan praktis ini umumnya tidak mempunyai tujuan yang strategis seperti perubahan posisi perempuan dan tidak juga mengugat bentuk-bentuk subordinasi meskipun kebutuhan praktis ini merupakan akibat dari hal tersebut.

Sedangkan pada pendekatan keadilan gender lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan strategis gender yakni kebutuhan yang dirumuskan dari analisa sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, dan dari analisa ini diidentifikasi kepentingan strategis gender untuk mencapai suatu kelembagaan masyarakat yang lebih setara dan lebih memuaskan daripada yang ada sekarang, baik dilihat dari struktur maupun sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan untuk mengatasi subordinasi perempuan yang sangat beragam, tergantung pada konteks budaya dan sosial politik. (Olyneux,1985).

### III.1.1. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Telah disebutkan bahwa menurut Mosser, masyarakat tidak melihat realitas peran rangkap yang dialami perempuan, dan kenyataan bahwa kebutuhan perempuan tidak selalu sama dengan kebutuhan laki-laki, maka mereka tidak menyadari perlunya keterkaitan perencanaan kebijaksanaan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan. Oleh karena itu maka dalam strategi pemberdayaan perempuan haruslah berangkat dari analisa gender sehingga di dalam perencanaannya dapat memenuhi kebutuhan praktis maupun strategis perempuan.

Di lain pihak bahwa pemberdayaan perempuan sudah menjadi wacana isu publik, dan dianggap suatu kebutuhan partai untuk mengkomodasinya. Persoalannya adalah cara pandang persoalan dan bagaimana para aktivis partainya mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu signifikan untuk melihat latarbelakang perlunya pemberdayaan perempuan untuk melihat bagaimana keterkaitan pemahaman dengan artikulasi pemahaman.

Sebagian besar aktivis partai melihat pentingnya pemberdayaan perempuan karena lebih pada jumlah atau prosentase perempuan yang lebih besar daripada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jawaban aktivis PDIP dan PAN

*"Pemberdayaan perempuan penting sekali, karena prosentase jumlah penduduk di Indonesia lebih besar perempuan dibanding laki-laki"* (aktivis PDIP)



*“Pemberdayaan perempuan sangat penting, apalagi di dalam partai politik, karena kita bicara rekrutmen, suara wanita lebih dari 50%, maka sangat penting pemberdayaannya” (aktivis PPP)*

Hanya satu partai yang melihat pentingnya pemberdayaan perempuan karena banyaknya persoalan perempuan (PAN), dan melihat satu partai yang melihat bahwa kondisi perempuan ini bisa dirubah(PKB).

*“Banyak sekali persoalan perempuan, misalnya persoalan tenaga kerja dan hak perempuan, dan masalah pendidikan yang perlu diperjuangkan.....” (aktivis PAN)*

Berikut ini adalah table pemetaan strategi yang dilakukan oleh aktivis partai dalam pemberdayaan perempuan:

**Tabel 9**  
**Strategi Pemberdayaan**

Partai	Strategi Pemberdayaan	Pemenuhan Kebutuhan
PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas Pendidikan</li> <li>- Membentuk koperasi</li> </ul>	Pemenuhan Kebutuhan Praktis
PKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merebut posisi pengambil keputusan</li> <li>- Membangun lembaga-lembaga pendidikan</li> <li>- Aktif dalam organisasi politik</li> <li>- Meningkatkan ketrampilan dan keahlian berorganisasi</li> <li>- Mencari kesempatan dalam kepengurusan</li> </ul>	Pemenuhan Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis
PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Ekonomi</li> </ul>	Pemenuhan Kebutuhan Praktis
PPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Politik</li> <li>- Pertemuan rutin informal</li> </ul>	Pemenuhan Kebutuhan Praktis
Golkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Politik</li> <li>- Memperbanyak anggota perempuan (jaringan)</li> <li>- Penguatan perempuan di partai</li> <li>- Pemberdayaan Ekonomi</li> </ul>	Pemenuhan Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis

Sumber: Data Primer, 2002

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Partai Kebangkitan Bangsa dan Golkar, dalam perencanaan strategi pemberdayaan perempuan memenuhi kebutuhan Praktis dan



Strategis. Sedangkan Partai lainnya, yaitu PAN, PDIP, dan PPP lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan praktis.

### **III.2. Interpretasi Kebijakan Partai Terhadap Isu Pemberdayaan Perempuan**

Dalam analisis Platform Partai menggunakan referensi Almanak Partai Indonesia (Julia Surya Kusuma, 1999). Hal ini dikarena kebijakan Nasional yang tertulis yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan sangat minim sekali, dan kebijakan partai tidak hanya bisa dilihat dari kebijakan tertulis saja, tetapi juga berdasarkan interpretasi pejabat parpol terhadap kebijakan partainya. Dalam Almanak Partai Politik Indonesia, platform partai berdasarkan wawancara dengan pejabat tertinggi parpol yaitu Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Sekretaris Jendral ataupun jajaran yang setingkat mengenai kebijakan partai.

Pada PDIP wawancara dilakukan dengan pada H. Haryanto Taslam (Wakil Sekretris Jenderal) dan Sabam Sirait (Anggota Dewan kehormatan PDIP). Sedangkan pada PAN, wawancara dilakukan dengan Drs. A.M. Fatwa (Ketua DPP PAN) dan Ir. Santoso (Wakil Sekretaris Jendral). Wawancara pada PPP dilakukan dengan H. Ali Marwan Hanan, SH (Sekretaris Jendral) dan Lena Mariana (Departemen Hubungan Kerjasama Internasional). Pada PKB, wawancara dilakukan dengan Drs. A Muhaimin Iskandar (Sekretrais Jendral), dan A. Effendy Choirie (Koordinator Humas). Sedangkan pada partai Golkar, wawancara dilakukan dengan Eki Syachrudin (Ketua DPP Golkar) dan Mahdi Sinambela(Wakil Sekretaris Jendral).

#### **III.2.1. Peluang Aspirasi Perempuan Dalam Partai Politik**

Hasil wawancara yang tertulis dalam Almanak Parpol Indonesia menunjukkan bahwa PKB melihat penegakan hak perempuan merupakan bagian penting dalam perjuangan partai. Oleh karena itu isu yang dikembangkan partai adalah mengeliminir diskriminasi pada perempuan, membangun kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta penegakan hak-hak perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PKB membentuk gerakan spesifik yaitu Pergerakan Perempuan PKB, dimana isu perempuan dapat diperjuangkan. Selama Orde Baru banyak sekali hak





warga negara yang dilanggar, yaitu salah satunya adalah Hak perempuan dan Anak, oleh karena itu strategi nasional untuk perjuangan hak perempuan adalah mempromosikan ratifikasi Hukum Internasional yang menetapkan Hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional.

PAN melihat peluang aspirasi perempuan secara politis sudah ada, tetapi implementasinya masih banyak hambatan, sehingga masih banyak terjadi pelecehan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap perempuan masih rendah. Hambatan ini dikarenakan tradisi dan nilai-nilai di masyarakat. Untuk mengatasinya PAN mempunyai agenda khusus, yaitu dalam susunan kepengurusan pimpinan partai, mulai pusat sampai ke daerah, dan ranting dibentuk Departemen Pemberdayaan Perempuan.

Partai Persatuan Pembangunan melihat kenyataan bahwa meskipun persentase perempuan dalam legislatif masih sedikit, tetapi peluang sudah diberikan cukup luas kepada kaum perempuan. Kendalanya adalah kesadaran politik perempuan masih lemah disamping sistem juga tidak mengakomodasi perempuan. Sedangkan dalam sosial-budaya, perempuan sejaka dalam rumah tangga, lingkungan masyarakat, bangsa, masih ditempatkan sebagai "*second-class society*". Oleh karena itu strateginya adalah melalui struktur pemerintahan, yaitu mempromosikan perempuan dalam posisi "*policy maker*", karena jumlah perempuan yang mendapat akses dalam struktur pemerintahan masih sedikit. Untuk mendukung kebijakan ini, maka diperlukan peningkatan pendidikan dan ketrampilan pada perempuan sehingga mampu bersaing dengan laki-laki.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melihat hambatan perempuan tampil di publik selain kodratnya, adalah hambatan psikologis dan teknis. Padahal potensi perempuan cukup besar dari segi jumlah dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu harus ada kesempatan untuk perempuan, karena meskipun kelihatannya tertinggal dari pria, bukan berarti kaum wanita tidak mempunyai kemampuan untuk tampil sebagai pribadi yang mempunyai kekuatan membangun dan mengerjakan pekerjaan yang selama ini sepertinya hanya monopoli dari kalangan laki-laki saja.

Peluang aspirasi perempuan menurut partai Golkar belum begitu luas, meskipun sudah banyak perempuan yang tampil di parlemen maupun di jajaran



eksekutif misalnya sebagai walikota dan bupati. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih memegang kuat budaya patriaki. Yang menjadi masalah dan perlu perhatian adalah wanita sebagai pekerja di tingkat bawah, karena akses terhadap pendidikan masih rendah. Oleh karena itu untuk meningkatkan keberdayaan perempuan di tingkat bawah, hal yang perlu diberikan pada kelompok tersebut utamanya adalah peningkatan di bidang pendidikan.

Tabel 10  
Strategi & Agenda Pemberdayaan Perempuan

Partai	Media/Alat yang digunakan	Strategi	Agenda Pemberdayaan Perempuan
PKB	Membentuk PPKB	- ratifikasi hukum internasional yang menetapkan hak perempuan dan anak	- Penegakan Hak-hak Perempuan - Mengeliminir diskriminasi - kesetaraan
PAN	departemen pemberdayaan perempuan	- agenda khusus (tidak jelas)	- kesetaraan - perlindungan - merubah budaya paternalistik - pendidikan
PPP	Wanita Persatuan	- mempromosikan perempuan dalam policy-decision maker	- pendidikan
PDIP	Departemen Wanita	Memberikan peluang bagi perempuan	
Golkar	Persatuan Perempuan Golkar	- pemberdayaan perempuan kelas bawah	- pendidikan

Sumber : Almanak Parpol Indonesia, 1999

Meskipun semua partai telah membentuk organisasi perempuan ataupun departemen wanita, tetapi dalam strategi dan isu yang diangkat oleh partai sebagian besar tidak menjawab semua persoalan perempuan. Disamping strategi dan agenda yang tidak begitu jelas, jika mengacu pada kebutuhan praktis-strategis gender (Olyneux, 1985), maka agenda partai ini belum menyentuh pada kebutuhan perempuan. Padahal pendekatan dan strategi pemberdayaan perempuan harus berangkat dari kondisi yang saat ini dialami (*kebutuhan praktis*) dan akar masalah yang menyebabkan kondisi tersebut (*kebutuhan strategis*).



### III. 2. 2. Kebijakan Partai Terhadap Kuota

Partai Kebangkitan Bangsa melihat kuota bukan suatu keharusan. Yang penting secara mendasar hak-haknya sama. Di lapangan, kalau kebetulan wanitanya lebih berkualitas, dia yang memimpin. Sepaham dengan PKB, PAN melihat kuota tidak perlu, karena menghormati azas keadilan, dimana semua tergantung pada kemampuan masing-masing. Hal ini juga merupakan kebijakan pada PPP, yang melihat bahwa tidak perlu kuota representasi perempuan, karena akan memaksakan. Oleh karena itu peluang keterwakilan perempuan dibiarkan berkembang sesuai dengan proporsi, kemampuan dan kodratnya. PDIP melihat kuota tidak perlu, karena yang penting adalah mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam politik. Partai Golkar bahkan melihat bahwa kuota tidak bisa diperlakukan karena setiap pengambilan keputusan berdasarkan keadilan, sebab keputusan mengabdikan kepada kebenaran, bukan pada kelompok laki-laki ataupun perempuan.

Tabel 11  
Kebijakan Kuota

Partai	Tingkat Pentingnya	Alasan
PKB	Tidak harus	Yang penting haknya sama
PAN	Tidak perlu	Tidak adil, tergantung kualitas
PPP	Tidak perlu	Berkembang dengan sendirinya sesuai dengan proposisi, kemampuan & kodrat
PDIP	Tidak perlu	Yang penting mendorong keberanian ibu-ibu dalam partisipasi politik
Golkar	Ngga bisa	Tidak adil

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

Keseluruhan partai menganggap bahwa kuota bukan suatu hal yang penting. Bahkan dua Partai menyatakan bahwa kuota melanggar azas keadilan. Pemahaman ini tentunya berdasarkan pada "*bias gender*" dan arogansi patriaki. Beberapa teori telah digunakan untuk menjustifikasi mendesaknya diberlakukan kuota perempuan pada parlemen. Selain alasan jumlah, dominasi laki-laki dalam posisi pengambilan keputusan membuat produk-produk kebijakannya "*gender*



*blind*" dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan yang seringkali berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian perempuan mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang mereka paling tahu dan paling bisa menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Alasan lainnya kuota adalah satu-satunya cara yang memungkinkan mengejar ketertinggalan perempuan dan under representation. Kuota tidak diskriminatif tetapi adalah kompesasi untuk kesulitan dan diskriminasi perempuan di bidang politik. Budaya yang berdasarkan gender yang dominasi laki-laki menyebabkan tingginya "*barrier*" perempuan untuk masuk dalam dunia politik meskipun hak politik perempuan sudah diakui sebagai hak asasi manusia. (IPU, New Dehli, 1997)

### **III.2.3. Kebijakan Partai Tentang Ketidakadilan Terhadap Perempuan**

#### **III.2.3.1. Kebijakan Partai Tentang Diskriminasi Kerja**

Diskriminasi kerja masih ada menurut PAN, tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Sedangkan PKB melihat diskriminasi masih terjadi. Untuk mengatasinya maka sistemnya harus diubah menjadi demokratis, dimana mungkin perlu ada hukum yang mengatur, dan pengawasan langsung. Sedangkan PPP melihat tidak perlu ada klasifikasi khusus pada perempuan. Selama ini perjuangan persamaan hak perempuan dengan laki-laki harus ada pengakuan perbedaan, sehingga jangan sampai perjuangan perempuan memperlihatkan kelemahannya. Partai Golkar melihat diskriminasi pekerjaan pada perempuan masih banyak terjadi akhir-akhir ini. Untuk mengatasinya, maka perlu diberikan pengertian kepada majikan untuk memahami hak-hak para buruh wanita. Sehingga majikan tidak merasa dipaksa atau merasa dirongrong oleh para buruhnya. Juga perlu adanya aturan-aturan yang manusiawi sesuai dengan kodrat buruh wanita. Di lain pihak pada majikan harus menyeimbangkan kewajiban dengan hak buruh sehingga nantinya bisa memberikan dorongan atau tambahan semangat buruh untuk meningkatkan kinerjanya.





Tabel 12  
Kebijakan Terhadap Diskriminasi Kerja

Partai	Diskriminasi Kerja	Cara
PKB	Masih ada	Sistem harus diubah menjadi demokratis
PAN	Masih ada tapi ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan wanita karena kodrat	-
PPP	Jangan sampai perjuangan perempuan memperlihatkan kelemahannya	Tidak perlu klasifikasi khusus
PDIP	Masih ada	Memberikan pengertian terhadap majikan, perlu aturan-aturan yang melindungi kodrat wanita
Golkar	Masih ada, karena jumlah perempuan banyak, dan tingkat pendidikan rendah, anggapan kepala RT adl laki-laki	Sementara tidak perlu ditanggapi, karena yang paling mendesak adalah penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

Diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan disebabkan oleh stereotype yang berdasarkan asumsi gender tertentu. Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Dalam kaitan dengan pekerjaan perempuan, karena anggapan lelaki adalah "pencari nafkah" keluarga, maka perempuan yang bekerja selalu dianggap "sambilan" atau "membantu suami" sehingga upah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Demikian juga banyak jenis pekerjaan perempuan yang dianggap "tidak bermoral" misalnya pekerjaan sebagai "pelayan" tempat minum atau "tukang pijat". Atau pekerjaan yang ada kaitannya dengan "industri" perhotelan dan "tourisme", serta pekerjaan yang dilakukan pada waktu malam hari, dianggap tidak bermoral.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam bentuk stereotype ini juga terjadi dalam dunia pekerjaan. Misalnya saja banyak buruh perempuan yang diperlakukan dengan tidak adil yang disebabkan oleh keyakinan stereotype tertentu terhadap perempuan yang berkeluarga, pada masa reproduksi seperti haid, hamil dan melahirkan dianggap tidak produktif.

Pemahaman Partai diatas yang diimplementasi dalam kebijakannya ternyata keseluruhannya (kecuali PKB) tidak mendasar pada persoalannya. Bahkan PAN melihat karena kodrat perempuan, maka ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan perempuan, dimana hal ini justru melanggengkan diskriminasi. Golkar



juga melihat bahwa persoalan diskriminasi ini tidak terlalu mendesak, karena yang paling penting adalah penyerapan lapangan pekerjaan.

### III.2.3.2. Kebijakan Partai Terhadap Issu Pekerja Seks

Selama ini isu tentang Pekerja Seks menjadi wacana yang cukup marak dalam gerakan perempuan. Berbagai analisis sudah menjadi *discourse* dalam melihat persoalan prostitusi. Sebagian besar partai melihat prostitusi sebagai persoalan ekonomi atau kemiskinan. Seperti PKB melihat faktor dari adanya prostitusi adalah ekonomi. Partai ini melihat seharusnya pekerjaan ini tidak ada, sehingga harus ada alternatif pekerjaan buat Pekerja Seks dengan jalan memberikan ketrampilan. Selain factor ekonomi, PKB melihat persoalan ini dari sisi moral, dimana meskipun karena keterpaksaan perempuan menjadi pekerja seks, tapi karena setiap harinya jadi terbiasa. Oleh karena itu perlu pembinaan moral agar keluar dari profesi ini.

Partai Amanat Nasional tidak sepakat dengan istilah pekerja seks dan industri seks. Tetapi profesi pekerja seks bisa dilegalisir sebagai aktualisasi profesi, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tetapi partai ini tidak setuju jika industri seks dilegalisir. Menurutnya, profesi ini sangat merendahkan martabat dan kehormatan wanita, tapi persoalan ini memang erat kaitanya dengan masalah ekonomi dan akhlak. PPP melihat betapapun secara sosial orang beranggapan bahwa ini adalah kenyataan dalam masyarakat, tapi kenyataan ini ini karena eksek dari keadaan, dari tanggung jawab keluarga masing-masing. Kebijakan PPP dalam hal prostitusi tidak pernah bergeser dari perjuangan, yaitu pemberantasan prostitusi, dan mengembalikan pekerja seks kepada keluarganya masing-masing. PDIP menilai bahwa secara teori dapat dikaji bahwa terjadinya prostitusi didorong karena kelangkaan lapangan pekerjaan. Sementara mereka (pekerja seks) butuh hidup, sehingga terpaksa melakukan prostitusi. Tidak bermoral, jika prostitusi dianggap pekerjaan, kalau bisa tidak ada lagi prostitusi di negeri ini. Menurut partai Golkar, perempuan yang terjebak di prostitusi harus dilindungi dan dicarikan pekerjaan. Karena ini terkait erat dengan kepentingan penganut agama, dan pendukung Golkar juga dari penganut agama, maka sulit Golkar untuk melegalisir pekerjaan ini. Golkar mungkin akan mengupayakan program-program bagaimana



mengeliminir pertumbuhan prostitusi di masyarakat. Oleh karena itu factor pendidikan sangatlah penting.

**Tabel 13**  
**Kebijakan Terhadap Fenomena Pekerja Seks**

Partai	Penyebab	Harapan	Cara
PKB	Faktor ekonomi, moralitas rendah	Pekerjaan ini terhapuskan	Pembinaan ketrampilan untuk mendapat pekerjaan yang wajar, pembinaan moral
PAN	Masalah ekonomi dan akhlak	Dihilangkan karena merendahkan martabat manusia	Pengembangan ekonomi dan akhlak
PPP	Ekses dari keadaan dantanggung jawab keluarga masing-masing	Profesi ini dilarang	Mengembalikan PS pada keluarga masing-masing
PDIP	Karena kelangkaan pekerjaan	Tidak ada lagi postitusi	
Golkar	Urusan PS sendiri,	Dikurangi	Meningkatan pendidikan

Sumber: Almanak Papol Indonesia, 1999

Selama ini persoalan prostitusi selalu dilihat dari persoalan moralitas semata, tanpa melihat realitas-realitas sosial yang melatarbelakanginya. Cara pandang ini ternyata juga terjadi pada partai dalam melihat persoalan prostitusi sehingga solusi yang ditawarkan selalu klasik pada "*pengantasan*" yang tidak berbasis pada akar masalah. Tingginya angka prostitusi di Surabaya (kelompok tiga besar se Asia), tidak pernah lepas dari persoalan kemiskinan struktural.

Tingkat urbanisasi yang tinggi pada kelompok perempuan juga tinggi, karena desa sudah tidak bisa memberikan lapangan kerja yang layak. Namun pencarian pekerjaan di kota tidak dibekali dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang mencukupi mengakibatkan akses yang rendah terhadap pekerjaan di kota. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan disebabkan karena diskriminasi terhadap akses pendidikan, juga peluang perkembangan pendidikan di desa yang masih rendah. Oleh karena itu maka, peluang kerja yang bisa diakses perempuan hanyalah pekerjaan informal seperti Pekerja Rumah Tangga, buruh kasar, ataupun Pekerja Seks. Hal lain yang menyebabkan perempuan terjebak dalam prostitusi adalah kekerasan yang dialaminya mulai dari korban perkosaan, KDRT, sampai pada perdagangan perempuan. Belum lagi budaya konsumtif yang dibangun oleh industri kapital yang selalu mensasarkan produk pada perempuan



dengan menawarkan “*dunia impian perempuan*” melalui produk-produknya. Hal ini menyebabkan tingginya budaya konsumtif pada perempuan dan sifat pragmatisme yang menggunakan “*berbagai cara*” untuk mencapai dunia impian tersebut.

### III. 2.3.3. Perlindungan Terhadap TKW dan PRT

Seluruh partai menyatakan bahwa perlindungan terhadap orang yang bekerja sebagai TKW dan PRT adalah suatu keharusan. PDIP melihat bahwa saat ini kasus pelanggaran HAM terhadap PRT cukup tinggi, meskipun tidak sebanyak yang dialami TKW, namun kita harus memberikan perlindungan pada orang yang berkerja sebagai PRT. Karena tenaga kerja yang berprofesi sebagai PRT ataupun TKW nyata-nyata adalah manusia yang harus kita berikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Mengenai Perlindungan hukum pada PRT dan TKW, Golkar melihat perlu satu perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pekerjaan tersebut. Selain gaji yang sangat rendah, ada unsure kesemena-menaan masyarakat, yang menganggap pembantu bisa dieksploitir. Partai Kebangkitan Bangsa melihat peran TKW yang cukup tinggi terhadap pembangunan, yaitu dengan mendatangkan devisa yang cukup banyak, dan sisi lain memberi peluang kesempatan bekerja di luar negeri seluas-luasnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja wanita Indonesia yang keluar negeri harus diimbangi dengan ketrampilan yang setinggi-tingginya supaya kompetitif. Pemerintah harus melakukan itu dibantu swasta. Disamping TKW yang berada di luar negeri harus mendapat perlindungan hukum.

Partai Amanat Nasional menyatakan sangat pentingnya perlindungan hukum bagi TKW, karena sudah sangat banyak kasus-kasus menyeramkan dan menyedihkan tentang wanita-wanita Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan perlindungan khusus bagi TKW dengan berbagai kerja diplomasi dengan negara tujuan kerja.





**Tabel 14**  
**Kebijakan Terhadap Fenomena TKW/PRT**

Partai	Perlindungan Terhadap TKW & PRT
PPP	- Memberikan Perlindungan Khusus - Loby diplomasi
PAN	- Sangat perlu perlindungan hukum
PKB	- Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, karena TKW mendatangkang devisa yang sangat banyak
Golkar	- Perlu Undang-undang yang mengatur Perlindungan TKW dan PRT, karena selain gajinya rendah juga dieksploitasi oleh majikan
PDIP	- Sudah saatnya ada jaminan terhadap tenaga-tenaga kerja informal dan perlindungan haknya.

Sumber :Almanak Parpol Indonesia, 1999

Kebijakan yang diambil seluruh partai dalam mengatasi masalah TKW dan PRT adalah perlindungan hukum saja. Padahal perlindungan hukum belum menyentuh akar persoalan mengapa jumlah perempuan yang harus menjadi TKW dan PRT tinggi. Persoalannya adalah rendahnya akses perempuan miskin terhadap pendidikan dan ketrampilan akibat proses diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan sehingga menyebabkan rendahnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang aman dan layak. Akibatnya ketika para perempuan miskin di desa migrasi ke kota untuk mencari penghidupan yang layak di kota, maka pekerjaan-pekerjaan yang eksploitatif dan tidak terlindungi (informal) saja yang mereka dapatkan seperti PRT, TKW, PKL, ataupun buruh kasar.

Di lain pihak pekerjaan pembantu rumah tangga adalah pekerjaan di wilayah rumah tangga yang dianggap urusan privat majikan-PRT saja, belum lagi pengaruh budaya feodal yang menganggap PRT sebagai "*batur*" yang merupakan turunan dari "*budak*", dimana PRT dianggap sebagai kepemilikan dari majikan sehingga tidak perlu kontrak kerja. Oleh karena itu jika terjadi kekerasan atau pelanggaran terhadap PRT, maka akan dianggap urusan rumah tangga, karena pembagian ruang *publik-privat* di dalam masyarakat (Winata, 2000, dalam Susanti, 2001). Bisa lihat bahwa munculnya persoalan PRT berakar dari persoalan ketidakadilan gender yang berlaku di masyarakat, sehingga jika kita ingin merubah kondisi ini, maka tidak hanya menjawab persoalan perlindungan hukum saja, tetapi juga mengurangi ketidakadilan pada perempuan.



### III.2.3.4. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Dari kelima partai, hanya PKB yang melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan bukanlah suatu pelanggaran hukum biasa, tetapi terjadi lebih pada ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki di masyarakat. Sehingga jika konsep HAM dan demokrasi dimaknai tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, maka persoalan ini tidak akan terjadi. Maka yang harus dilakukan adalah tidak hanya melindungi perempuan, tetapi mengangkat harkat dan martabat wanita sejajar dengan laki-laki. Sedangkan PAN melihat kasus kekerasan terhadap perempuan sama saja dengan yang terjadi pada laki-laki. Oleh karena itu yang paling penting untuk dilakukan adalah penegakan hukum. Sedangkan PDIP menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan penyelesaiannya secara hukum. Oleh karena itu supremasi hukum mutlak diperlukan oleh bangsa kita pada saat ini, karena supremasi hukum itu akan menjamin keselamatan hidup dan kehidupan kita di dalam memasuki millennium ketiga saat ini, termasuk juga dalam praktik kehidupan ekonomi dalam hubungannya dengan-bangsa lain. Mengenai penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, partai Golkar menyatakan apabila hukum ditegakkan, maka tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan. Yang selama ini banyak aparat hukum di Kejaksaan dan kepolisian yang dapat disogok, apalagi kalau korbannya orang kecil. Sementara itu PPP melihat bukan hanya pelanggaran terhadap HAM, sekecil apapun kejahatan yang dilakukan harus diproses secara hukum, karena dengan inilah kita menghormati hak asasi manusia. Sedangkan proses hukum itu sendiri harus obyektif.

Tabel 15

Kebijakan Partai Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan

Partai	Persepsi	Solusi
PPP	Sama dengan pelanggaran hukum lainnya	Harus diproses melalui hukum, harus dengan bukti, tidak bisa dengan subjektivitas kita sendiri
PAN	Sama dengan pelanggaran hukum terhadap laki-laki	Penegakan hukum
PKB	Terjadi karena tidak ada kesetaraan laki-laki dan perempuan.	Penegakkan HAM
Golkar	Pelanggaran hukum	Penegakkan hukum
PDIP	Pelanggaran hukum	Supremasi hukum

Sumber: Almanak Parpol Indonesia



Dari pemetaan kebijakan partai terhadap isu Kekerasan Terhadap perempuan, dilihat bahwa hampir keseluruhan partai tidak melihat bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan berakar pada pola relasi gender laki-laki-perempuan yang tidak setara (Cedaw, 1974). Bahkan kalau kita lihat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sampai saat ini kasus ini mencapai angka tertinggi dari kasus kekerasan terhadap perempuan (SA-KPPD, dalam Jawa Pos, 2002), merupakan akibat relasi kuasa suami-istri yang timpang dan istri (keluarga) dianggap sebagai kepemilikan suami (kepala keluarga). Rosalia Scortino (2000) menyebutkan bahwa dikotomi dunia publik-privat yang terjadi dan harmonisasi keduanya telah secara sistematis menyembunyikan dan melanggengkan kekerasan yang dialami seorang perempuan, baik oleh suaminya, ayah, kakak, ataupun keluarga lainnya. Pelanggengan dikotomi ini dibangun laki-laki untuk mendapatkan 'ruang sisa' untuk mengekspresikan superioritas yang telah dikebiri oleh relasi-relasi impersonal, formal legalistik, dan birokratis, dan penuh dengan kalkulasi-kalkulasi prestasi dunia publik. Tidak heran bila laki-laki mempertahankan dunia domestiknya karena disitulah dia mengalami kepuasan superioritas dan dominasinya. Bentuk pelanggengannya adalah dengan cara subordinasi dengan menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga--yang berarti memimpin, berkuasa atas ranah domestiknya--dan perempuan/istri sebagai pendamping atau yang dipimpinnya, atau dikuasainya. Penguatan sub-ordinasi kepada istri di dalam ranah keluarga ini juga diperkuat dengan konsep harmoni yang terus diideologikan kepada keluarga oleh negara.

#### **III.2.4. Kebijakan Partai Mengenai Hukum Yang berperspektif Perempuan**

Dilihat dari peluang mendesak hukum dan perundangan yang mengakomodasi kepentingan perempuan, ternyata kebijakan hampir seluruh partai kecuali PAN menganggap bahwa tidak perlu ada undang-undang yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Hampir seluruh partai menganggap bahwa undang-undang khusus untuk perempuan adalah bentuk dari diskriminasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melihat bahwa perlindungan dan kepastian hukum adalah untuk semua warga baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu pada undang-undang yang mengatur pelecehan ataupun perkosaan terhadap



perempuan tinggal disempurnakan. Partai Golkar melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan karena penegakan hukum yang lemah, oleh karena itu harus pemerintah harus menjamin penegakan hukum di negara kita. Pada PPP bahkan menganggap hukum yang khusus melindungi perempuan adalah salah satu bentuk eksklusifisme perempuan. Padahal kalau perempuan mau eksklusif, maka itu merupakan bentuk dari pelecehan pada kaum perempuan sendiri.

**Tabel 16**  
**Kebijakan Terhadap Hukum Yang Mengakomodasi Perempuan**

Partai	Hukum/Peraturan yang mengakomodasi perempuan	Alasan
PPP	Sudah cukup	Perempuan tidak boleh eksklusif, karena akan mengecilkan perempuan sendiri
PAN	Kurang	Perlindungan hukum bagi perempuan masih kurang
PKB	Tidak perlu	Kepastian hukum tidak boleh diskriminatif
Golkar	Cukup	Yang menjadi masalah adalah penegakan hukum
PDIP	Tidak perlu	Hukum tidak boleh diskriminatif, hukum bagi keselamatan dan keamanan warga baik laki-laki maupun perempuan

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

Meskipun dikatakan bahwa hukum yang bersumber pada HAM bersifat universal, namun pendekatan yang bersifat netral-berlaku baik pada laki-laki maupun perempuan-tidak sesuai dengan realitas relasi gender di masyarakat yang selama ini hanya berfokus pada gender tertentu saja. Hukum sebagai alat yang dibuat manusia untuk mengatur hidup berbangsa ternyata tidak bisa menjawab segala bentuk ketidakadilan akibat dominasi gender tertentu, karena pihak-pihak yang membuat produk hukum tidak lepas dari dominasi budaya patriarki. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa kepentingan hukum yang melindungi perempuan merupakan tindakan diskriminatif, tapi malahan merupakan tindakan demokratis, karena melihat persoalan realitas yang sebenarnya dimana realitas masyarakat lekat dengan gender yang berlaku di masyarakat.





### III.3. Akses Organisasi Perempuan Terhadap Kebijakan Partai

#### III.3.1 Posisi Organisasi Perempuan Dalam Partai

Posisi organisasi perempuan dalam partai sangat menentukan apakah organisasi perempuan tersebut mempunyai peluang/kesempatan dalam pengambilan keputusan kebijakan partai. Dengan melihat ada/tidaknya akses perempuan terhadap proses pengambilan keputusan, maka dapat kita prediksikan peluang artikulasi kepentingan perempuan melalui organisasi perempuan dalam partai. Pada partai PDIP, hasil diskusinya menyimpulkan bahwa posisi atau peran perempuan/organisasi adalah melakukan pekerjaan teknis partai di lapangan, sedangkan laki-lakinya mengurus partai.

*" ...pembagian tugas, dimana laki-laki yang mengurus partai, sedangkan perempuan yang bagian mengurus langsung dengan masyarakat bawah " (Aktivis PDIP)*

Pembagian peran ini berdasarkan pemahaman gender, dimana karena perempuan dianggap lemah lembut, perhatian, merawat, tidak pandai, dll. Sedangkan laki-laki dianggap rasional, pandai, tidak bisa merawat, maka peran yang dilekatkan pada perempuan adalah peran yang berkaitan dengan pelayanan dan berifat teknis. Sedangkan peran yang dilekatkan pada laki-laki adalah peran yang membutuhkan pemikiran, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang membutuhkan rasionalitas dan kepandaian. (Oakley, 197). Dengan demikian maka, dapat dikatakan bahwa peluang artikulasi kepentingan perempuan dalam partai ini lemah, kurang ada akses untuk mendesakkan kebijaka-kebijakan yang bertujuan untuk merubah kondisi perempuan.

Pada Partai Kebangkitan Bangsa terdapat mekanisme rekomendasi, yaitu ada kebijakan dari DPP bahwa perempuan harus diakomodir, kemudian kebijakan tersebut diteruskan di wilayah dan dibawahnya. Meskipun kelihatannya pengurus PKB di wilayah/daerah setuju, tapi dalam prakteknya kadang ada yang menghambat tergantung figure perempuannya, kalau mumpuni maka akan diakomodir. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam PKB ada mekanisme rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi sarana artikulasi kepentingan perempuan. Kendalanya adalah pada budaya dan sikap pengurus laki-laki yang masih *gender bias*. Hambatan ini cukup kuat, karena pengurus di PKB yang didominasi oleh



kyai dan budaya patron clien yang masih kuat, dimana jika kyai mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan, maka akan mudah sekali kebijakan tersebut diputuskan. Selain dukungan kyai, figure aktivis partai juga sangat menentukan keberhasilan rekomendasi, jika figure perempuannya mumpuni dan berpengalaman, maka bisa memberikan pengaruh pada kalangan ulama tersebut

*“ Memang di PKB banyak ulama, kalau kita bicara dengan ulama memang sulit kita bantah. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman, maka ulama bisa juga melakukan kesalahan. Ketika kyai ngomong tetapi tidak sesuai dengan kenyataan bisa kita bantah. Oleh karena itu kitamasih proses, dengan bisa beradaptasi dengan tradisi, misalnya etika dengan kyai, meski kita mengkritik, tetap menghormati kyai..”*

Posisi perempuan di PAN dapat dilihat dari pelibatan perempuan di jajaran kepengurusan. Sampai saat ini prosentase perempuan di pengurus partai sekitar 35%, yaitu pada jajaran pengurus Ketua II, sekretaris, biro pemberdayaan perempuan, ketua koperasi, ketua biro perempuan dan anak, dan ketua pengembangan pendidikan. Namun jika dilihat dari posisi departemen/divisi yang dipegang perempuan sangat khas perempuan, yang sebenarnya lekat dengan asumsi *“gender bias”*. Divisi koperasi, ibu dan anak, serta pengembangan pendidikan adalah peran-peran pelayanan yang selalu dilekatkan pada perempuan karena asumsi bahwa perempuan adalah perhatian, ulet, rajin, cermat, lemah lembut, dll, sehingga sesuai dengan pekerjaan tersebut. (Fakih, 1998). Meskipun masih *“bias gender”*, tetapi tingginya jumlah perempuan dalam jajaran pengurus dapat menjadi peluang atikulasi kepentingan perempuan.

Pada PPP, posisi organisasi perempuan tidak langsung ke partai, tetapi bertanggung jawab pada departemen wanita kalau di pusat, biro wanita di propinsi, dan bagian di cabang. Posisi struktural ini menunjukkan bahwa rekomendasi organisasi harus melalui departemen atau biro wanita. Walaupun ada rekomendasi pusat untuk melibatkan wanita masuk dalam struktur organisasi, tetapi hanya pada posisi-posisi yang tidak terlalu strategis untuk pengambilan keputusan.

*“...wanita hanya berada didalam kepengurusan yang tidak signifikan misalnya di biro, departemen, dan bagian lain-lain yang tidak terlalu penting”*



Pada partai Golkar, dukungan pusat sangat kuat, apalagi ketua umum KPPG adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan ketua hariannya adalah Ketua Kaukus Parlemen (Jaringan Parlemen Perempuan). Dengan kuatnya figure aktivis perempuan di pusat, maka memudahkan munculnya rekomendasi dari pusat ke bawah.

*“pusat sudah mendukung dan sudah kuat, tinggal implementasi di lapangan, karena para tokoh ini sibuk maka perlu dijobdiskripsikan ke orang lain untuk pelaksanaannya. Meskipun sekarang di Golkar ada kendala, tapi bagi saya pusat sudah memberikan dukungan tinggal jalan saja”*

Kuatnya dukungan pusat ini dapat dilihat dari turunnya surat keputusan Ketua DPP Golkar untuk mendirikan KPPG di wilayah dan daerah-daerah dan sampai sekarang sudah berdiri KPPG di 6 cabang di Jawa Timur.

**Tabel 17**  
**Posisi Organisasi Perempuan Dalam Partai**

Partai	Posisi Perempuan/Organisasi Perempuan Dalam Partai	Akses pada Kebijakan
PDIP	Pembagian tugas, dimana laki-laki yang mengurus partai, sedangkan organisasi perempuan mengurus teknis masyarakat bawah	Lemah
PKB	Adanya kebijakan DPP, bahwa PKB harus mengakomodasi rekomendasi PPKB	Ada
PAN	DPP menetapkan 30% kuota perempuan dalam kepengurusan partai	Ada
PPP	Struktur Organisasi dibawah departemen/biro, tidak langsung ke partai	Lemah
Golkar	Kepengurusan dan posisi perempuan di pusat sudah establish, tinggal di daerah/wilayah	Sedang

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

### III.3.2. Peluang Perempuan Dalam Kepengurusan Partai

Selain dari pemetaan posisi organisasi perempuan, peluang aktivis perempuan dalam kepengurusan partai politik juga dapat menggambarkan peluang artikulasi kepentingan perempuan dalam parpol. Peluang perempuan duduk dalam kepengurusan sangat ditentukan oleh kebijakan partai, dimana jika partai mendukung dan memberikan kebijakan khusus, maka peluang tersebut akan semakin mudah.

Peluang aktivis perempuan PDIP untuk duduk di kepengurusan adalah sama dengan laki-laki. Artinya selama memenuhi persyaratan dan criteria yang ditetapkan partai maka baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pengurus partai. Pada keempat partai yang lain ada "affirmative action", yaitu perlakuan khusus untuk perempuan, karena melihat system dan budaya yang menghambat perempuan untuk mendapatkan akses pada posisi pengambil keputusan. Bentuk dari "affirmative action" adalah berbentuk kuota untuk PKB, PAN, dan Golkar, tapi juga ada dalam bentuk rekomendasi pengurus pusat. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa peluang pada PDIP lemah, karena system dan budaya patriaki, yang berlaku di masyarakat kita masih menempatkan perempuan pada sektor domestik, sehingga perempuan yang aktif dan menjadi pemimpin publik dianggap aneh/tabu.

**Tabel 18**  
**Peluang Perempuan dalam Kepengurusan Partai**

<b>Partai</b>	<b>Peluang Perempuan di Kepengurusan Partai</b>
PDIP	Peluang yang sama dengan laki-laki sesuai criteria yang ditetapkan partai, seperti pintar, cekatan, mempunyai dedikasi tinggi dan perjuangan pada partai
PKB	- Kuota 20% - Duduk di minimal salah satu wakil ketua
PAN	- diakomodasi 35%
PPP	- Ada rekomendasi pusat untuk melibatkan wanita dalam kepengurusan
Golkar	- kuota 30% dengan persyaratan

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

### **III.3.3. Kebijakan Kuota Perempuan di Parlemen**

Hampir semua aktivis partai menyatakan perlu adanya kuota perempuan dalam parlemen kecuali aktivis perempuan dari PDIP, yang menyatakan tidak perlu kuota, karena jika perempuan dapat meningkatkan kualitas, maka akan dapat merebut posisi. Dalam hal ini perempuan tidak bisa menuntut, tapi harus bersaing secara fair karena sehingga akan muncul pemimpin yang memiliki nilai tambah. Hal ini dapat dilihat dari petikan diskusi





*"...perempuan tidak bisa menuntut, tapi dengan kerja keras akan menyaingi laki-laki dan muncul di permukaan, dengan kuota tidak menjamin apakah perempuan yang ada harus memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa"*

**Tabel 19**  
**Kebijakan Kuota**

Partai	Kebijakan Kuota
PDIP	Tidak perlu kuota, karena jika perempuan meningkatkan kualitas, maka akan dapat merebut posisi
PKB	Perlu diperjuangkan kuota 20%
PAN	Pengurus pusat mendukung kuota 30%
PPP	
Golkar	Kuota 30% asal memenuhi persyaratan

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu diperjuangkan kuota 20% di fraksi maupun di partai sesuai dengan UU Politik Kepartaian. Oleh karena itu, maka perlu disosialisasikan oleh PPKB ke PKB Jawa Timur, Surabaya, dan anak cabang tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut. Aktivis PAN menyatakan bahwa pengurus pusat sangat mendukung kuota 30% bagi perempuan. Hal ini terbukti pada Rakernas PAN, dimana kebijakan kuota diterima, sehingga menguatkan kader untuk mengisi kuota. Aktivis partai Golkar melihat bahwa meskipun kebijakan partai memberikan kuota 30%, tetapi organisasi perempuan harus siap menyiapkan kader-kader yang sesuai dengan persyaratan. Untuk mencari kader perempuan yang sesuai dengan persyaratan saja cukup sulit.

*" .....bulan November nanti, nama-nama sudah harus ada. Sampai 2003 nanti menyiapkan 30% cukup susah. Oleh karena itu kita harus siap, sehingga tidak ada anggapan bahwa kita tidak mampu melaksanakan tanggung-jawab. Jadi kita harus proaktif"*

### III. 3. 4. Strategi Pemberdayaan Perempuan Internal Partai

Untuk mencapai kualitas kader perempuan, maka partai melakukan beberapa strategi pemberdayaan untuk aktivis/kader perempuan. Tabel diatas adalah pemetaan strategi pemberdayaan perempuan berdasarkan analisa pemenuhan kebutuhan perempuan Susan Balackburn(1991) yang meminjam analisa Maxine Molyneux(1986). Blacburn menggunakan konsep yang disebut "practical interest", yaitu kepentingan yang muncul karena kondisi konkrit perempuan, misalnya kebutuhan makanan, kesehatan, dan kebutuhan praktis lainnya. Selanjutnya adalah konsep "strategic interest", yaitu menyangkut



perbaikan posisi tawar perempuan terhadap laki-laki dan perubahan pola relasi gender yang membuatnya ter subordinasi.

**Tabel 20**  
**Strategi Pemberdayaan Internal**

Partai	Strategi Pemberdayaan	
	Kebutuhan Praktis	Kebutuhan Strategis
PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan perempuan dalam kepanitian kegiatan</li> <li>- Membentuk koperasi</li> <li>- Pelatihan manajemen organisasi</li> <li>- Peningkatan pengetahuan</li> <li>- Pelatihan manajemen SDM</li> <li>- Pelatihan peningkatan etika pergaulan dan kepribadian</li> </ul>	
PKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk koperasi simpan pinjam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan politik</li> <li>- Seminar &amp; diskusi gendermainstreaming</li> <li>- Pelatihan advokasi</li> </ul>
PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengajian</li> <li>- pendampingan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ceramah/seminar</li> </ul>
PPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diskusi rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelatihan politik untuk wanita</li> </ul>
Golkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengembangan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan politik</li> <li>- Membangun jaringan kaukus politik</li> <li>- Pelatihan women budget</li> </ul>

Sumber: Almanak Parpol Indonesia, 1999

Dalam hal ini PDIP strateginya terfokus pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan. Tidak adanya strategi yang memenuhi kebutuhan strategis menggambarkan tidak adanya peluang untuk perubahan sistem masyarakat yang lebih adil bagi perempuan. Sedangkan pada PPKB strategi pemberdayaan perempuan adalah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan strategis. Diharapkan dari strategi ini dapat mengubah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, dan memberika kesamaan gender di dalam akses dan kedudukan di bidang politik. Pemenuhan kebutuhan praktis juga dilakukan pada PPKB yaitu melalui koperasi simpan pinjam, pelayanan kesehatan reproduksi. Kebutuhan ini sangat mendesak, karena melihat kebutuhan kader PPKB yang secara ekonomi rendah.



*"...program yang paling urgen untuk kaseer perempuan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan, karena orang-orang PKB mayoritas adalah kelompok ekonomi lemah...." (Aktivis PPKB)*

Sedangkan pada PAN, menurut pengurus pemberdayaan perempuannya, strategi pemberdayaan perempuan adalah melalui pendidikan politik, meskipun masih dalam taraf ceramah umum dua atau tiga bulan sekali dengan mengundang pembicara dari luar. Menurut salah satu pengurus PAN, seharusnya dilakukan pendidikan politik berupa penyadaran hak perempuan baik di tingkat pengurus maupun di akar rumput. Sedangkan untuk kebutuhan praktis dilakukan pendampingan ekonomi. Hasil diskusi ini aktivis PAN melihat perlunya melakukan strategi pemberdayaang untuk pemeuhan kepentingan strategis, yaitu pelatihan penyadaran hak meskipun masih dalam wacana. Sedangkan untuk kebutuhan praktis sudah dilakukan dengan memberikan bantuan kredit.

Aktivis PPP menyatakan bahwa strategi untuk pemberdayaan perempuan dilakukan dengan melakukan diskusi rutin formal maupun informal. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik bagi perempuan dilakukan dengan mengadakan pendidikan politik, disamping mengikutsertakan kader-kader wanita terhadap pelatihan-pelatihan yang dilakukan LSM atau lembaga perguruan tinggi. Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa strategi yang dilakukan di PPP masih informal dan lebih reaksi pada program luar partai. Sedangkan pada partai Golkar, pemenuhan kebutuhan strategis dilakukan dengan mengadakan pelatihan politik dan women budget serta aktif membangun jaringan parlemen perempuan yang mempunyai perhatian pada pemberdayann perempuan di partai seperti Kaukus Parlemen. Sementara itu pemenuhan kebutuhan praktis dilakukan dengan pendampingan ekonomi.

#### **III. 4. Kegiatan Organisasi Perempuan**

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan partai menggambarkan implementasi pemahaman dan strategi yang dipahami organisasi perempuan partai sebagai cara untuk melakukan perubahan pada perempuan. Kegiatan organisasi perempuan PDIP merupakan gambaran dari program-program yang menjawab kebutuhan praktis yaitu kebutuhan yang hanya untuk mengatasi kondisi yang



dialami tetapi tidak menjawab bagaimana merubah posisi perempuan sehingga tidak ada lagi ketidakadilan gender. Macam atau bentuk kegiatan juga khas dengan peran gender perempuan yaitu peran-peran pelayanan seperti pengobatan, koperasi, dll yang muncul karena asumsi bahwa perempuan adalah lemah lembut, perhatian, ulet, trampil sehingga cocok dengan tugas-tugas perawatan dan pelayanan.(Oakley, 1972). Sedangkan program-program PPKB lebih pada pemenuhan kebutuhan strategis. Diskusi Advokasi dan gendermainstreaming dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kader-kader perempuan khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan. Pembentukan PPKB di anak cabang (kecamatan) bertujuan untuk memperluas ruang berorganisasi kader perempuan di tingkat yang lebih rendah. Sedangkan audensi dengan ketua PKB untuk pemberlakuan kuota 20% adalah upaya mempengaruhi kebijakan partai untuk meningkatkan perwakilan perempuan di parlemen. Program ini akan baik, apabila kebutuhan praktis perempuan juga diperhatikan, mengingat kondisi kemiskinan perempuan di Surabaya tinggi.

**Tabel 21**  
**Kegiatan Organisasi Perempuan**

Partai	Kegiatan Organisasi Perempuan
PDIP	1. Membuat momen yang besar untuk memerahkan Jawa Timur
	2. Mendidik koperasi mega gotong royong.
	3. Pengobatan gratis setiap minggu rutin di Jawa Timur.
PKB	1. Diskusi gendermainstreaming dan Advokasi Perempuan
	2. Audensi dengan ketua PKB(wilayah, kota, dan cabang) tentang pemberlakuan kuota 20% di fraksi dan partai (UU Politik dan Kepartaian).
	3. Menambah pembentukan PPKB di beberapa kecamatan
	4. Koperasi simpan pinjam
PAN	1. Lokakarya untuk meningkatkan kualitas kader partai
	2. Pendidikan politik melalui kelompok pengajian
	3. Pendidikan ketrampilan kapster
	4. Pendampingan ekonomi
PPP	1. Musyawarah Kerja
	2. Pasar Rakyat untuk seluruh lapisan masyarakat Surabaya
Golkar	1. Sosialisasi dan pembentukan KPPG di kota-kota/kecamatan
	2. Konsolidasi
	3. Pelatihan & seminar tentang gendermainstreaming.

Sumber: Data Primer, 2002





Untuk Departemen Pemberdayaan Perempuan PAN, program lebih banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan praktis seperti pengajian, ketrampilan kapster dan simpan pinjam. Pendidikan politik melalui pengajian tidak bertujuan pada membangun kesadaran perempuan. Lokakarya dilakukan untuk mensinergiskan program pusat dengan wilayah/daerah, karena selama ini dirasa kurang ada suatu pemahaman dan persamaan dalam implementasi pemberdayaan perempuan. Hal ini dapat dilihat, meskipun program-program Pusat cukup banyak dan baik, namun tidak tersosialisasikan di bawah.

Organisasi Wanita Kesatuan tidak melakukan kegiatan spesifik untuk pemberdayaan perempuan, tetapi lebih pada program-program umum partai seperti pasar murah dan kegiatan rutin tahunan yaitu mukernas. Partai Golkar pada bulan-bulan ini terfokus pada konsolidasi dan pengembangan KPPG. Dari konsolidasi diharapkan dapat menjangkau kuota 30% dengan persyaratan yang telah menjadi kebijakan partai. Selain untuk kepentingan Pemilu 2004, pembentukan KPPG di ranting-ranting dapat menjadi sarana kader perempuan untuk berorganisasi dan mengartikulasikan kepentingan perempuan. Pembentukan dan konsolidasi KPPG ini akan efektif, jika dibekali dengan pendidikan dan penyadaran gender bagi kader, karena rendahnya pemahaman dan tingkat kesadaran gender aktivis perempuan di KPPG, tentunya tidak menjamin upaya artikulasi kepentingan perempuan di partai maupun di parlemen terjadi. (Sicoro, 2002).



## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### IV. 1. Simpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peluang artikulasi kepentingan perempuan melalui organisasi perempuan partai. Untuk mengetahui peluang tersebut, maka dilihat pemahaman dan pengetahuan pengurus organisasi perempuan partai, interpretasi kebijakan partai, dan implementasi program partai dalam upaya pemberdayaan perempuan. Beberapa temuan pokok dalam penelitian ini adalah ;

Pertama, dari lima organisasi perempuan partai, tiga partai yang melihat persoalan ketidakadilan gender dari sudut pandang "perspektif gender". Dua partai lainnya masih belum bisa membedakan antara kodrat dan gender, akibatnya dalam melihat akar masalah/penyebab ketidakadilan gender karena kesalahan perempuan sendiri. Sebaliknya organisasi perempuan yang sudah memahami analisa gender akan melihat bahwa akar persoalan perempuan adalah pada budaya yang sangat "male bias". Implikasi dari pemahaman ini adalah pada strategi yang direncanakan dalam pemberdayaan gender, dimana pengurus yang "bias gender" akan merencanakan program/strategi yang hanya memenuhi kebutuhan praktis perempuan seperti ketrampilan, simpan pinjam, koperasi, dll yang bertujuan untuk mengatasi kondisi kemiskina perempuan. Sebaliknya pengurus yang memahami analisis gender akan merencanakan program yang menjawab kebutuhan strategis perempuan, yaitu untuk menjawab perubahan posisi perempuan dalam masyarakat.

Kedua, dari interpretasi kebijakan partai terhadap pemberdayaan perempuan, terlihat bahwa meskipun dibentuk lembaga/organisasi perempuan, tapi tidak menjamin kepentingan isu perempuan terakomodasi. Kuota sebagai salah satu cara untuk menjamin terwakilinya suara perempuan, ternyata tidak dianggap perlu oleh pengurus pusat kelima partai tersebut. Sedangkan pada penanganan bentuk-bentuk ketidakadilan pada perempuan diantaranya diskriminasi kerja, perempuan yang terjebak dalam prostitusi, dan perlindungan terhadap TKW dan PRT, kebijakan partai hanya menyentuh pada permukaan dan



bersifat “mengatasi”, bukaan pemecahan masalah yang berangkat dari akar persoalan seperti pengaturan undang-undang, pemberian ketrampilan, dll. Bahkan persoalan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai kriminal biasa, tanpa melihat realita sosial yang melatabelakanginya. Dalam memandang hukum dan peraturan perundang-undangpun tidak dilihat sebagai realitas sosial yang sarat dengan “bias gender”, sehingga partai menolak untuk diberlakukan peraturan yang spesifik perempuan, karena dianggap diskriminatif.

Ketiga, Akses organisasi perempuan dalam kebijakan partai dapat dilihat dari posisi perempuan dalam partai. Dari kelima organisasi perempuan, hanya dua organisasi perempuan mempunyai posisi yang kuat dalam partai. Meskipun secara cultural masih sulit, tetapi ada mekanisme “*rekomendasi pusat*” yang dapat mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dua partai lainnya organisasi perempuannya masih dimarginalkan, sedang yang satu lagi masih baru umumnya. Dilihat dari strategi pemberdayaan internal, hanya dua partai yang mempunyai strategi yang efektif bagi perempuan, yaitu yang bisa memenuhi kebutuhan praktis dan strategis.

Keempat, Bentuk dan Program Kegiatan Organisasi Perempuan menggambarkan implementasi dari strategi yang direncanakan dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dari program-program yang dilaksanakan organisasi perempuan dalam dekat-dekat ini, hanya dua organisasi perempuan yang menfokuskan pada upaya meningkatkan posisi perempuan dalam partai dan parlemen, dan peningkatan kemampuan dalam artikulasi kepentingan perempuan melalui lobby kuota dan pendidikan politik dan kesadaran gender. Program organisasi perempuan partai lainnya lebih cenderung untuk melakukan program-program karitatif yang hanya menjawab kebutuhan praktis perempuan bukan kebutuhan strategis yang lebih substansial dan menjawab akar persoalan perempuan yaitu relasi gender yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan.



## IV.2. Saran

Untuk meningkatkan peluang artikulasi kepentingan perempuan dapat dilakukan melalui partai. Oleh karena itu maka perlu ditingkatkan akses perempuan terhadap kebijakan partai dan kemampuan artikulasi pengurus perempuan melalui organisasi perempuan yang telah ada pada partai tersebut. Dari hasil temuan, terlihat bahwa persoalan yang paling mendasar adalah rendahnya pemahaman pengurus partai terhadap isu perempuan dan kedua adalah hambatan pada partai itu sendiri. Ada beberapa masukan yang dapat dilakukan oleh organisasi perempuan di partai untuk menjawab persoalan ini antara lain :

Pertama, Pelatihan dan Pendidikan Gender Sensitivity, yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan peran perempuan dalam politik dan isu gender. Pelatihan ini juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-haknya. Pelatihan ini sekaligus adalah pendidikan politik bagi kader partai.

Kedua, adalah pengembangan strategi untuk membawa "suara perempuan" dalam partai politik. Metode analisa gender dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah gender dan di bidang politik dan di partai, sedang gender planning dapat membantu mengembangkan program-program organisasi. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan partai.

Ketiga, adalah menggalang kekuatan di luar partai, yaitu dengan jalan membangun jaringan antara organisasi perempuan partai ataupun dengan NGO atau organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen bersama dalam meningkatkan artikulasi kepentingan perempuan. Secara berjangkauan, maka bisa dilakukan upaya mendesakkan keterwakilan perempuan dan program-program perempuan di setiap lini di masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Baird, Vanessa. 1992. *We've Only Just Begun*. New Internationalist. January. pp 4-7
- Blackburn. Susan, *How Gender is Neglected in Southeast Asian Politic*, dalam Maila Stivens (ed). 1991. *Why Gender Matter in Shoutheast Asian Politics*, Melbourne: Monash University.
- Djajaningrat, Madelon, *Ibuism And Priyayization : Path to Power*, dalam E. Locher-Scholten dan Aniehof (ed), *Indonesia Women in Focus*, KITLV, Foris Publication. Dordrecht.
- Engineer, Asghar Ali, 1992, *The Rights of Women in Islam*, London: C. Hurst and Co.Ltd.
- Fakih, Mansour. 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habermas, Jurgen, 1995, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, PT Pustaka Grafiti, Jakarta
- Kusuma, Julia C, *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesian New Order*, Institute of Social Studies, Den Haag, 1991
- Langerberg, Michael van, 1986, *Analyzing Indonesian's New Order State: A Keyword Approach*, RIMA (Review of Indonesian and Malaysian Affairs), dalam Kusuma, Julia C, 1991, *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesian New Order*, Institute of Social Studies, Den Haag.
- Mari'ah, Chusnul, "Kepemimpinan Politik Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Edisi 7 Mei, 1998, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Mosse, Julia Cleves. 1993. *Half The World, Half A Chance: An Introduction To Gender And Development*. Oxford UK: Oxfam.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Training Gender Manual : Handout for Gender Awareness Trainer*, Oxford UK: Oxfam.
- Mies, Maria, 1986, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*, dalam Kusuma, Julia C, *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesian New Order*, Institute of Social Studies, Den Haag, 1991



Myakayaka, Mavivi & Manzini, 2002, *Perempuan Diberdayakan-Perempuan dalam Parlemen di Afrika Selatan "Perempuan di Parlemen: Buka Sekedar Jumlah"*, Jakarta, AMEPRO

Notosusanto, Smita, 1997, *Perempuan dan Politik Internasional*, dalam kumpulan tulisan "*Perempuan dan Pemberdayaan*". Jakarta, Penerbit Obor

Oakley, Aan, 1972, *Sex, Gender, and Society*, New York

Soejipto, Ani, 2000, *Perempuan dan Politik di Indonesia*, dalam "*Benih Bertumbuh*" kumpulan karangan untuk Prof. Tapi Omas Ihromi, Yogyakarta

Whithworth, Sandra. 1994, *Feminism and International Relations*. New York: St. Martin's Press

Zein, Wahidah. 1999. *Gender and "Other" Women in Feminism*. *Journal Masyarakat Kebudayaan dan Politik: Race*, Surabaya: Fisip Unair



## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Wasiaturrahma, s.e  
 2. NIP : 132 230 685  
 3. Pekerjaan : Dosen Ekonomi  
 Universitas Airlangga  
 4. Pangkat/Golongan : Penata Muda/ IIIA  
 5. Jabatan Struktural : -  
 6. Jenis Kelamin : Perempuan  
 7. Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep. 19 April 1968  
 8. Agama : Islam  
 9. Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga  
 Jl. Airlangga 4 -6 Surabaya.  
 10. Riwayat Pendidikan : Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga  
 11. Pengalaman Kerja/ Penelitian

No.	Judul Penelitian	Sumber Dana	Keterangan
1.	"Pola Pengembangan Usaha Pedagang Ijon".	P3M FE UNAIR	Anggota
2.	Kasus Tanah, Pola Penanganan dengan Kasus-kasus Tanah di Jawa Timur.	P3M FE UNAIR	Anggota

Surabaya, 15 Maret 2001

Wasiaturrahma, SE  
 NIP. 132 230 685

- 1 OCT 2004

AMERAN

